

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Organisasi, Administrasi dan financial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sementara itu dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama yang pada saat berada dibawah Departemen Agama ditangani oleh Direktorat, setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal. Perubahan ini tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan, baik dari segi ketenagaan, administrasi, financial maupun sarana prasarana.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember 1989), Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Jambi pada saat itu masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Jambi masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mewilayahi 6 Pengadilan Agama yaitu :

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bulian
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal
4. Pengadilan Agama Muara Bungo
5. Pengadilan Agama Bangko
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Muara Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 yang ditanda tangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid, terbentuklah Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Muara Sabak yang kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 terbentuklah pula Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Agama Sengeti.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi sekarang ini wilayah hukumnya meliputi 10 (sepuluh) wilayah kota dan kabupaten di propinsi Jambi, yaitu:

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bulian
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal
4. Pengadilan Agama Muara Bungo
5. Pengadilan Agama Bangko
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh
7. Pengadilan Agama Muara Sabak
8. Pengadilan Agama Sarolangun
9. Pengadilan Agama Muara Tebo
10. Pengadilan Agama Sengeti

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia, yaitu

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang Agung"

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

C. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Penyusunan Renstra harus mengikuti Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2006, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Renstra merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.

Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, pada akhir tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkan jabatan struktural baru.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2017, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Meningkatkan Manajemen Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Sasaran :
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepastian Hukum dan Lembaga Peradilan
Sasaran :
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

D. Review Indikator Kinerja Utama

Evaluasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Salah satunya adalah evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat beberapa perubahan pada Sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : W5-A/1491/OT.01.1/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Review Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Perbandingan antara jumlah perkara tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum putus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
		b. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Yang diup load dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Semesteran Dan Laporan Tahunan

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI & PELAYANAN PUBLIK

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

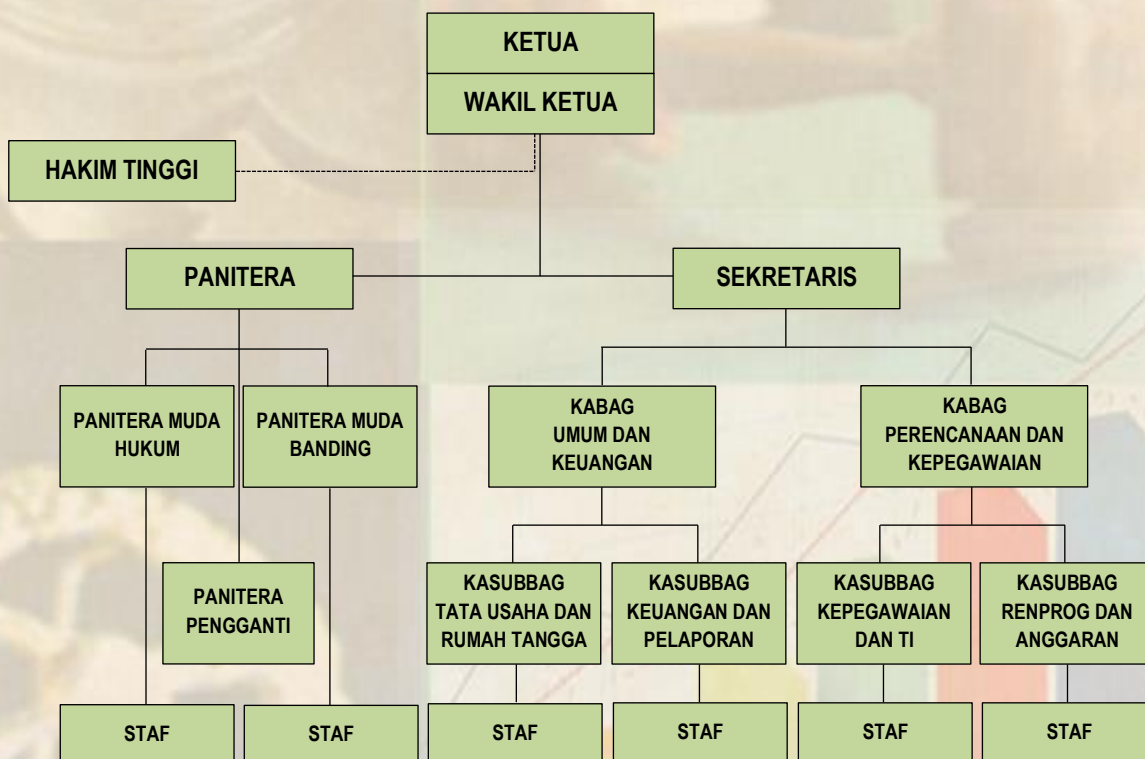
Kekuasaan kehakiman tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Kekuasaan kehakiman tersebut adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dari tugas pokok dan fungsi badan Peradilan tersebut baik itu pelaksana fungsi teknis maupun fungsi pendukung, diperlukan sumber daya manusia yang tertata dalam satu struktur organisasi yang baik. Struktur tersebut menggambarkan alur tupoksi dan garis komando dalam sebuah organisasi tak terkecuali seperti di Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI.

Secara teori, struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

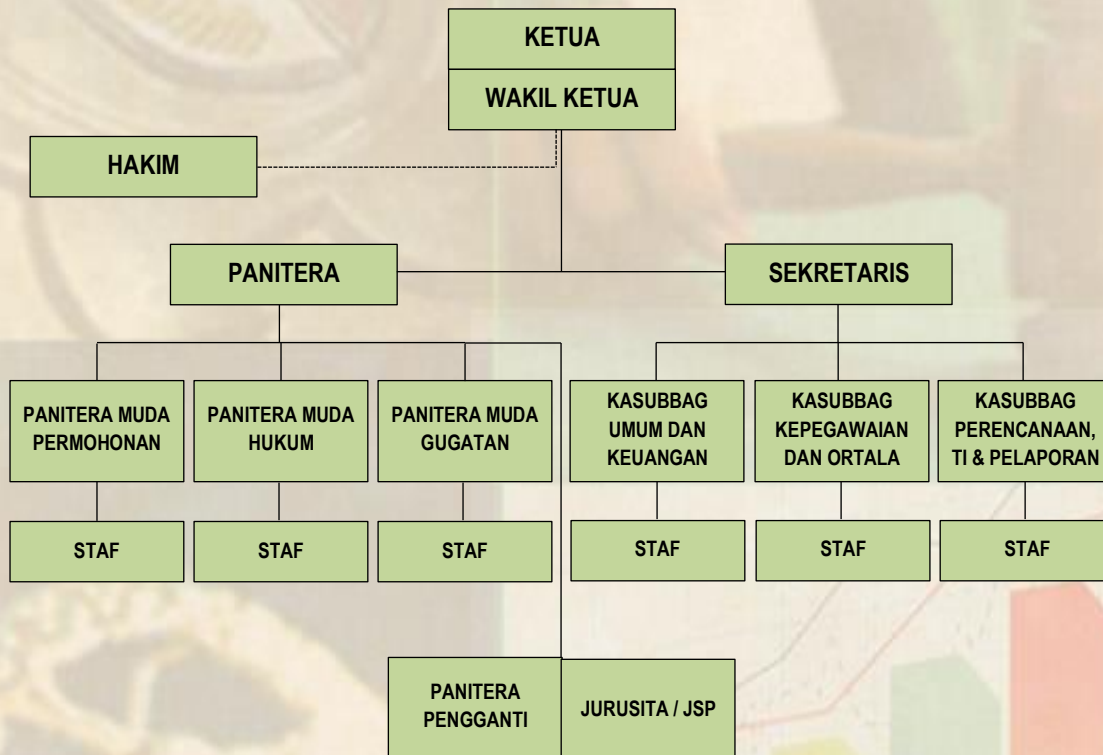
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara umum struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi menggambarkan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur tersebut menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Adapun gambaran struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan dibawahnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Pengadilan Agama



Reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya merupakan salah satu upaya untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Upaya ini dapat berjalan secara optimal ketika didukung oleh aparatur Mahkamah Agung RI yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam bekerja. Komitmen dan kompetensi aparatur Mahkamah Agung dapat diwujudkan dalam kinerja yang baik, jika mereka didukung oleh sistem kerja yang baik dan didukung oleh semua komponen organisasi. Sinkronisasi dan integralisasi suatu mekanisme kerja penting dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu, maka metoda, tata kerja, dan prosedur kerja penting dirumuskan dalam suatu prosedur yang baku melalui standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, untuk mengevaluasi kinerja dari aparatur Mahkamah Agung RI diperlukan juga penilaian kinerja yang dapat memberi petunjuk bagi pimpinan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier pegawai.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis untuk melaksanakan penyelenggaraan aktifitas organisasi yang memuat bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa pekerjaan dilakukan. Tujuan dibuatnya SOP ini antara lain :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan
2. Kepastian pekerjaan selesai dilaksanakan
3. Akuntabilitas pekerjaan yang dilaksanakan

SOP yang sudah ada di Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah disesuaikan dengan format yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012. Semua SOP yang telah disusun ini meliputi tugas- tugas yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jambi dari mulai pimpinan, hakim, pejabat struktural eselon II, III, dan IV, Pejabat Fungsional, Panitera Pengganti sampai kepada staf. Secara garis besar SOP yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi terdapat pada Matrik SOP berikut ini :

Tabel 2.1
Matrik SOP Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TERDIRI DARI	KETERANGAN
I	TEKNIS PTA JAMBI			
1	Ketua	22	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan Remunerasi 4. SOP Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu. Taspen. 5. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ke BKN dan Badilag 6. SOP pengusulan CPNS menjadi PNS 7. SOP Pengusulan PNS 8. SOP Pengusulan Ujian dinas Tk. 1, Tk II serta ujian penyesuaian ijazah 9. SOP pembuatan DUS, DUK, dan besetting formasi Pegawai 10. SOP Penyusunan Job description 11. SOP Pembuatan surat tugas dan SPPD 12. SOP Pembuatan dan pembaruan SK 13. SOP Penerbitan surat pemberitahuan KGB	<i>Belum dievaluasi</i>

			14. SOP Penerbitan SPMJ 15. SOP Pengusulan penghargaan satyalancana 16. SOP Pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan 17. SOP Pembuatan dan pencatatan PMH dan PHS 18. SOP Pengiriman laporan perkara 19. SOP penanganan laporan pengaduan masyarakat 20. SOP Pengadaan ATK Perkara 21. SOP Persidangan 22. SOP Minutasi dan pengiriman berkas perkara banding	
2	Wakil Ketua	8	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP cuti pegawai 4. SOP Pelaksanaan Absensi 5. SOP Pembuatan dan pencatatan PMH dan PHS 6. SOP Pengadaan ATK Perkara 7. SOP Persidangan 8. SOP Minutasi dan pengiriman berkas perkara banding	
3	Hakim Tinggi	4	1. SOP Pembuatan dan pencatatan PMH dan PHS 2. SOP Pengadaan ATK Perkara 3. SOP Persidangan 4. SOP Minutasi dan pengiriman berkas perkara banding	
4	Panitera	7	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP Pencatatan berkas perkara banding 4. SOP Pembuatan dan pencatatan PMH dan PHS 5. SOP pembuatan laporan perkara tk. Banding 6. SOP pembuatan rekapitulasi laporan perkara tk. Pertama 7. SOP pengiriman laporan perkara	
5	Panitera Muda Hukum	9	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP pembuatan laporan perkara tk. Banding 4. SOP pembuatan rekapitulasi laporan perkara tk. Pertama	

			5. SOP pengiriman laporan perkara 6. SOP Statistik perkara 7. SOP Arsip perkara 8. SOP lap. Pengaduan masyarakat 9. SOP pelayanan permohonan informasi	
6	Panitera Muda Banding	6	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP penerimaan berkas perkara banding dari PA 4. SOP pencatatan berkas perkara banding 5. SOP persidangan 6. SOP minutasi dan pengiriman berkas perkara banding	
7	Panitera Pengganti	8	1. SOP penerimaan berkas perkara banding dari PA 2. SOP pencatatan berkas perkara banding 3. SOP pembuatan dan Pencatatan PMH dan PHS 4. SOP biaya proses perkara tk banding 5. SOP pengadaan atk perkara 6. SOP persidangan 7. SOP minutasi dan pengiriman berkas perkara banding 8. SOP mekanisme pelaporan biaya proses	
II	NON TEKNIS PTA JAMBI			
1	Sekretaris	36	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Penatausahaan, pendistribusian dan pelaporan persediaan ATK 3. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 4. SOP Penyetoran dan laporan PNPB 5. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan Remunerasi 6. SOP Rekonsiliasi Lap. Keuangan Bulanan ke KPPN 7. SOP Penyusunan Lap. CALK semesteran dan Tahunan 8. SOP Penyusunan Laporan CALK Korwil DIPA 005.04 semesteran dan tahunan 9. SOP Laporan Alokasi Belanja daya dan jasa 10. SOP Laporan Realisasi Anggaran Manual	

			11. SOP Penyusunan lap. BMN semesteran dan tahunan 12. SOP Penyusunan lap. BMN korwil DIPA 005.04 semesteran dan tahunan BMN 13. SOP identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah untuk aplikasi SIMANTAP 14. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN 15. SOP Penatausahaan BMN 16. SOP Penetapan Status Penggunaan BMN 17. SOP Penggantian BMN hilang dengan tuntutan ganti rugi 18. SOP Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu. Taspen. 19. SOP Cuti pegawai 20. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ke BKN dan Badilag 21. SOP pengusulan CPNS menjadi PNS 22. SOP Pengusulan PNS 23. SOP Pengusulan Ujian dinas Tk. 1, Tk II serta ujian penyesuaian ijazah 24. SOP pembuatan DUS, DUK, dan besetting formasi Pegawai 25. SOP Penyusunan Job description 26. SOP Pembuatan surat tugas dan SPPD 27. SOP Pembuatan dan pembaruan SK 28. SOP Pelaksanaan absensi 29. SOP Penerbitan surat pemberitahuan KGB 30. SOP Penerbitan SPMJ 31. SOP Pengusulan penghargaan satyalancana 32. SOP Pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan 33. SOP Pengelolaan website 34. SOP Revisi DIPA 35. SOP Penatausahaan Hibah langsung berupa barang 36. SOP monitoring capaian kinerja per triwulan	
2	Kabag Umum dan Keuangan	6	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP Penyusunan Lap. CALK semesteran dan Tahunan 4. SOP Penyusunan Laporan CALK Korwil DIPA 005.04 semesteran dan tahunan 5. SOP Laporan Alokasi Belanja daya dan jasa	

			6. SOP identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah untuk aplikasi SIMANTAP	
3	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	21	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu. Taspen. 4. SOP Cuti pegawai 5. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ke BKN dan Badilag 6. SOP pengusulan CPNS menjadi PNS 7. SOP Pengusulan PNS 8. SOP Pengusulan Ujian dinas Tk. 1, Tk II serta ujian penyesuaian ijazah 9. SOP pembuatan DUS, DUK, dan besetting formasi Pegawai 10. SOP Penyusunan Job description 11. SOP Pembuatan surat tugas dan SPPD 12. SOP Pembuatan dan pembaruan SK 13. SOP Pelaksanaan absensi 14. SOP Penerbitan surat pemberitahuan KGB 15. SOP Penerbitan SPMJ 16. SOP Pengusulan penghargaan satyalancana 17. SOP Pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan 18. SOP Pengelolaan website 19. SOP Revisi DIPa 20. SOP Penatausahaan Hibah langsung berupa barang 21. SOP monitoring capaian kinerja per triwulan	
4	Kasub bag Tata Usaha Dan Rumah tangga	13	1. SOP Peminjaman buku-buku perpustakaan 2. SOP Pemanfaatan fasilitas Perpustakaan non peminjaman 3. SOP Pengiriman buku perpustakaan 4. SOP Pemeliharaan BMN 5. SOP Pelaksanaan kebersihan gedung kantor 6. SOP Penatausahaan, pendistribusian dan pelaporan persediaan ATK 7. SOP Protokol 8. SOP Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 serta PBB 9. SOP Penatausahaan surat masuk 10. SOP Pengurusan surat tertutup (rahasia) 11. SOP mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar	

			12. SOP penggunaan BMN berupa laptop dan kendaraan dinas 13. SOP Penunjukan penggunaan rumah Negara	
5	Kasub bag Keuangan Dan Pelaporan	16	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP Pengajuan belanja pegawai 4. SOP Pengajuan uang persediaan ke KPPN 5. SOP Pengajuan belanja modal ke KPPN 6. SOP Penyetoran dan laporan PNB 7. SOP Pengajuan permintaan tunjangan remunerasi 8. SOP rekonsiliasi lap. Keuangan bulanan ke KPPN 9. SOP Penyusunan laporan CALK semesteran dan tahunan 10. SOP penyusunan lap. CALK korwil DIPA 005.04 semesteran dan tahunan 11. SOP Laporan alokasi belanja daya dan jasa 12. SOP Lap. Realisasi manual 13. SOP Penyusunan Lap. CALK semesteran dan Tahunan 14. SOP Penyusunan Laporan CALK Korwil DIPA 005.04 semesteran dan tahunan 15. SOP identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah untuk aplikasi SIMANTAP 16. SOP asset hibah	
6	Kasub bag Kepegawaian dan TI	18	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu. Taspen. 4. SOP Cuti pegawai 5. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ke BKN dan Badilag 6. SOP pengusulan CPNS menjadi PNS 7. SOP Pengusulan PNS 8. SOP Pengusulan Ujian dinas Tk. 1, Tk II serta ujian penyesuaian ijazah 9. SOP pembuatan DUS, DUK, dan besetting formasi Pegawai 10. SOP Penyusunan Job description 11. SOP Pembuatan surat tugas dan SPPD 12. SOP Pembuatan dan pembaruan SK 13. SOP Pelaksanaan absensi	

			14. SOP Penerbitan surat pemberitahuan KGB 15. SOP Penerbitan SPMJ 16. SOP Pengusulan penghargaan satyalancana 17. SOP Pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan 18. SOP Pengelolaan website	
7	Kasub bag Rencana Program dan Anggaran	6	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP Rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga 4. SOP Revisi DIPA 5. SOP Penatausahaan Hibah langsung berupa barang 6. SOP monitoring capaian kinerja per triwulan	
8	Staf sub. bag Tata Usaha Dan Rumah tangga	13	1. SOP Peminjaman buku-buku perpustakaan 2. SOP Pemanfaatan fasilitas Perpustakaan non peminjaman 3. SOP Pengiriman buku perpustakaan 4. SOP Pemeliharaan BMN 5. SOP Pelaksanaan kebersihan gedung kantor 6. SOP Penatausahaan, pendistribusian dan pelaporan persediaan ATK 7. SOP Protokol 8. SOP Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 serta PBB 9. SOP Penatausahaan surat masuk 10. SOP Pengurusan surat tertutup (rahasia) 11. SOP mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar 12. SOP penggunaan BMN berupa laptop dan kendaraan dinas 13. SOP Penunjukan penggunaan rumah Negara	
9	Staf sub. Bag Keuangan Dan Pelaporan	16	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP Pengajuan belanja pegawai 4. SOP Pengajuan uang persediaan ke KPPN 5. SOP Pengajuan belanja modal ke KPPN 6. SOP Penyetoran dan laporan PNB 7. SOP Pengajuan permintaan tunjangan remunerasi	

			8. SOP rekonsiliasi lap. Keuangan bulanan ke KPPN 9. SOP Penyusunan laporan CALK semesteran dan tahunan 10. SOP penyusunan lap. CALK korwil DIPA 005.04 semesteran dan tahunan 11. SOP Laporan alokasi belanja daya dan jasa 12. SOP Lap. Realisasi manual 13. SOP Penyusunan Lap. CALK semesteran dan Tahunan 14. SOP Penyusunan Laporan CALK Korwil DIPA 005.04 semesteran dan tahunan 15. SOP identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah untuk aplikasi SIMANTAP 16. SOP asset hibah	
10	Staf sub. Bag Kepegawaian & TI	18	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu. Taspen. 4. SOP Cuti pegawai 5. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ke BKN dan Badilag 6. SOP pengusulan CPNS menjadi PNS 7. SOP Pengusulan PNS 8. SOP Pengusulan Ujian dinas Tk. 1, Tk II serta ujian penyesuaian ijazah 9. SOP pembuatan DUS, DUK, dan besetting formasi Pegawai 10. SOP Penyusunan Job description 11. SOP Pembuatan surat tugas dan SPPD 12. SOP Pembuatan dan pembaruan SK 13. SOP Pelaksanaan absensi 14. SOP Penerbitan surat pemberitahuan KGB 15. SOP Penerbitan SPMJ 16. SOP Pengusulan penghargaan satyalancana 17. SOP Pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan 18. SOP Pengelolaan website	
11	Staf Sub. Bag Rencana Program dan anggaran	6	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP Rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga 4. SOP Revisi DIPA	

			5. SOP Penatausahaan Hibah langsung berupa barang 6. SOP monitoring capaian kinerja per triwulan	
12	Staf panmud Banding	6	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP penerimaan berkas perkara banding dari PA 4. SOP pencatatan berkas perkara banding 5. SOP persidangan 6. SOP minutasi dan pengiriman berkas perkara banding	
13	Staf panmud hukum	9	1. SOP Penatausahaan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan mengirim surat keluar 3. SOP pembuatan laporan perkara tk. Banding 4. SOP pembuatan rekapitulasi laporan perkara tk. Pertama 5. SOP pengiriman laporan perkara 6. SOP Statistik perkara 7. SOP Arsip perkara 8. SOP lap. Pengaduan masyarakat 9. SOP pelayanan permohonan informasi	

Standard Operational Procedure tersebut merinci tugas masing-masing tingkatan jabatan sesuai dengan kewenangannya.

1. Eselon I

Tugas Eselon II dalam SOP merupakan tugas yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon I melalui Keputusan dan Edaran. Melalui kewenangannya Eselon II merupakan decision maker dalam setiap usulan dari pejabat di tingkat bawahnya. Tugas pejabat eselon II juga mengkompilasi tugas yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

2. Eselon III

Pejabat eselon III dalam SOP merupakan pejabat di tingkat middle. Tugas utama dari pejabat eselon III adalah menganalisa usulan pejabat eselon IV atas resiko, benefit dan faktor legal dari setiap keputusan yang akan dibuat.

3. Eselon IV

Pejabat eselon IV dalam SOP bertugas menyusun data-data yang diberikan oleh staf untuk kemudian dikompilasi menjadi satu bentuk berkas.

4. Staf

Pejabat Staf merupakan bagian pangkal dan ujung dari rangkaian tugas dalam SOP. Staf bertugas dalam providing data dan distribusi hasil keputusan dari pejabat eselon di atasnya.

5. Fungsional

- SOP Penyelesaian Perkara Banding yang melibatkan staf kepaniteraan, Panitera Muda Banding, Panitera, dan Ketua PTA Jambi.
- SOP Rekapitulasi Pelaporan Bulanan Perkara Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang melibatkan staf kepaniteraan, Panitera Muda Banding, Panitera dan Ketua PTA Jambi.
- SOP Statistik Perkara yang melibatkan staf kepaniteraan, Panitera Muda Banding, dan Panitera.
- SOP Pelayanan dan permohonan Informasi yang melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penanggung Jawab Informasi dan Petugas Informasi.

b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Pelaksanaan

Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana yang tuang dalam pasal 20 diatas, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeris Sipil yang terdiri atas unsur SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan Prilaku Kerja.

Melaksanakan amanat pasal 12, pasal 20 undang-undang no 43 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan telah melakukan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi pimpinan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Agama Jambi dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil terutama yang berkaitan dengan:

1. Kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (job design).
2. Pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya.
3. Pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil.
4. Pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, promosi, mutasi atau kompensasi lainnya.

Dalam sistem penilaian prestasi kerja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi, setiap pegawai wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. Sasaran Kerja Pegawai disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan

dan kapan harus selesai. Setiap Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilaksanakan, target sebagai hasil kerja yang harus diwujudkan, dengan mempertimbangkan aspek kuantitas/output, kualitas, waktu dan dapat disertai biaya. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara sistemik penekanannya pada pengukuran tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai atau tingkat capaian hasil kerja (output) yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja.

Tabel 2.2
Matriks SKP Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	NAMA	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN 2017
1	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.	Ketua	30
2	Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	15
3	Drs. M. Nasir Daud	Hakim Tinggi	16
4	Drs. H. Muslim, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	17
5	Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.	Hakim Tinggi	15
6	Drs. Asri Damsy, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	17
7	Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.	Hakim Tinggi	17
8	Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.	Hakim Tinggi	16
9	Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H.	Hakim Tinggi	18
10	Drs. H. Mas'ud	Hakim Tinggi	14
11	Drs. H. Mayskurin Hamid, S.H., M.S.I.	Hakim Tinggi	18
12	Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	18
13	Drs. H. S. Syekhan Al Jufri	Hakim Tinggi	16
14	Hartati, S.H., M.H.	Panmud. Banding	13
15	Sahril, S.H., M.H.	Panmud. Hukum	22
16	Faizal, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	10
17	Baharuddin Jalil, S.H.	Panitera Pengganti	9
18	Hj. Yahidah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	10
19	Henry Hanafi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	11
20	Drs. Namlis, M.H.	Panitera Pengganti	9
21	Mawardi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	10
22	Drs. Zubir Ishak, M.H.	Panitera Pengganti	10
23	Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H.	Panitera Pengganti	9
24	Drs. Aidil Mujahid	Panitera Pengganti	11
25	Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum, M.H.	Panitera Pengganti	9

26	Nur Mulyanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	9
27	Dian Sari Wulandari, S.Ag.	Panitera Pengganti	9
28	H. Idris Latif, S.H., M.H.	Sekretaris	13
29	Drs. Jumaani Soleh	Kabag Umum & Keuangan	9
30	Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H.	Kabag Perencanaan & Kepeg.	9
31	H. Zainal Abidin, S.Ag, M.H.	Kasub Bag TU & Rumah Tangga	22
32	Syapruddin, S.Ag.	Kasub Bag Renc. Prog. & Anggaran	20
33	Budi Barliansyah, S.E.	Kasub Bag Keu & Pelaporan	11
34	Muthiya Sari, S.Sos., M.H.	Kasub Bag Kepegawaian & TI	22
35	Tri Wahyuni, S.Kom.	Staf	18
36	Wiwit Rahmadhani, S.E.	Staf	17
37	Rini Hafsari Susilawati, S.E.	Staf	9
38	Ahmad Ghufran, S.E., M.M.	Staf	13
39	M. Ukbah Rizal, S. Kom	Staf	13
40	Imam Nurwanto, S.H.I	Staf	10
41	Widianingsih, A.Md.	Staf	10
42	Gusmi Yanti Fitriani, S.H.	Staf	12
43	Panca Indriatari, A.Md.	Staf	11
44	Vina Amrina	Staf	12
45	Rovel Rinaldi, S.H.I, M.H.	Staf	8
46	Enita	Staf	16

Tabel 2.3
Matriks SKP Pengadilan Agama Jambi

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN 2017	KETERANGAN
1	Ketua	27	
2	Wakil Ketua	18	
3	Hakim	12	
4	Panitera	35	
5	Panmud Hukum	12	
6	Panmud Gugatan	9	
7	Panmud Permohonan	8	
8	Panitera Pengganti	7	
9	Jurusita	7	
10	Jurusita Pengganti	5	
11	Sekretaris	25	
12	Kasubbag Umum dan Keuangan	24	

13	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	24	
14	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	10	
15	Staf Kepegawaian	14	
16	Staf Panmud Permohonan	14	
17	Staf Umum dan Keuangan	19	

Tabel 2.4
Matriks SKP Pengadilan Agama Sengeti

NO	NAMA	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN 2017
1	H. Rijlan Hasanuddin, Lc	Plt Ketua	15
2	Yunizar Hidayati.,S.HI	Hakim	13
3	Rahmatullah Ramadan D., S.HI	Hakim	13
4	Apit Farid., S.HI	Hakim	14
5	Mhd Syukri Adly., S.HI.,MA	Hakim	12
6	Drs. Idwal Maris., MH	Panitera	24
7	Yudhistira Adi Pinto.,S.E.,MH	Sekretaris	14
8	Dakardi., S.Ag.,M.Sy	Wakil Panitera	18
9	Drs. Said Hasan A., MH	Panmud Gugatan	8
10	Romi Herusman Saputra.,S.HI.,MH	Panmud Hukum	8
11	Siti Hairiah., S.HI	Panmud Permohonan	8
12	H.Solikun.,S.SosI.,S.H.,M.H	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	12
13	Angga Setiawan Rahardi.,S.H.,M.H	Kasubbag Umum dan Keuangan	15
14	Rindom Ridona.,S.HI.,MH	Kasubbag Perc TI dan Pelaporan	12
15	Arief Mustaqim.,S.EI.,M.Sy	Panitera Pengganti	6
16	Umarriad Bafadhal.,SH.,MH	Panitera Pengganti	6
17	Rosda Maryanti.,S.E.Sy	Panitera Pengganti	6
18	Adityawarman.,S.HI.,MH	Panitera Pengganti	6
19	Ismiatus., S.Pd.,M.H	Panitera Pengganti	6
20	Haristo.,S.H	Panitera Pengganti	6
21	Arsil Hadi., S.H.,M.H	Jurusita	12
22	Tabri., S.Ag.,S.H	Jurusita	8
23	Imran., A.Md	Jurusita	8
24	Muhammad Faizal., A.Md	Jurusita	7
25	Hj. Susila Eka Ningsih	Jurusita Pengganti	10
26	Umi Ulfah Tarigan., S.H.,M.H	Jurusita Pengganti	12
27	Elin Marlina	Jurusita Pengganti	16

Tabel 2.5
Matriks SKP Pengadilan Agama Muara Sabak

NO	NAMA	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN 2017
1	Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag	Ketua	41
2	Dra. Siti Patimah, M.S.y	Wakil Ketua	18
3	Sulistianingtias Wibawanty, S.H	Hakim	13
4	Ayeb Soleh, S.H.I	Hakim	13
5	Muhlashin, S.Ag	Panmud Hukum	10
6	Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H	Panmud Permohonan	8
7	Sanusi Pane, S.H.I., M.H	Panmud Gugatan	9
8	Kamal Shaputra, S.H	Panitera Pengganti	7
9	Siti Rawdiah Sari, S.H	Panitera Pengganti	6
10	Sunarti, S.H	Panitera Pengganti	6
11	Lestri Handayani, S.H., M.H	Panitera Pengganti	6
12	Ya'akub, S.H	Panitera Pengganti	6
13	Syirwan Syahyalam	Juru Sita	7
14	Arif Sulistiyo	Juru Sita	7
15	Marzuki, S.H	Sekretaris	16
16	Suhardi, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian Dan Ortala	14
17	Dedi Arizal, S.E	Kasubbag Perenc., TI Dan Pelaporan	12
18	Fadli, S.H., M.H	Kasubbag Umum Dan Keuangan	14
19	Surya Darni S, S.E	Staf	14
20	Dyah Triningsih, S.E	Staf	6

Tabel 2.6
Matriks SKP Pengadilan Agama Kuala Tungkal

NO	NAMA	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN 2017
1	Senen, S. Ag. M.H.	Ketua	41
2	Baihna, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	30
3	Darul Fadli, S.H.I., M.A.	Hakim	19
4	Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.	Hakim	19
5	Muhammad Hidayatullah, S.H.I.	Hakim	19
6	Ilyas, S.H.	Panitera	43
7	Raden Muhammad Syafii, S.Ag.	Sekretaris	38
8	M. Habibullah, S.E.I., M.H.	Panmud Hukum	18
9	Arifin, S.H., M.H.	Panmud Gugatan	9

10	Darlan, S.Sos.I.	Kasubbag Perenc., TI dan Pelaporan	23
11	Sri Kandi, S.Ag., M.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	19
12	Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	28
13	Erwan, S.H.	Panitera Pengganti	7
14	Asmuni, S.Sos.I.	Jurusita	13
15	Yulizar Sy, S.Pd., M.H.	Jurusita	10
16	Khairun Nisa	Jurusita	12
17	Muhammad Helmi	Jurusita	15
18	Imron Hidayat, S.Kom	Staf	14
19	Misrani	Staf	23

Tabel 2.7
Matriks SKP Pengadilan Agama Muara Bulian

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN 2017	KETERANGAN
1	Ketua	25	
2	Wakil Ketua	-	
3	Hakim	12	
4	Panitera	19	
5	Panmud Hukum	21	
6	Panmud Permohonan	14	
7	Panmud Gugatan	19	
8	PP	12	
9	Jurusita	10	
10	JSP	-	
11	Sekretaris	17	
12	Kasubbag Umum & Keuangan	22	
13	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	21	
14	Kasubbag Peren., TI, & Pelaporan	14	
15	Staf	-	

Tabel 2.8
Matriks SKP Pengadilan Agama Sarolangun

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN 2017	KETERANGAN
1	Ketua	37	
2	Wakil Ketua	12	
3	Hakim	12	
4	Panitera	22	

5	Sekretaris	17	
6	Wakil Panitera	12	
7	Panmud Gugatan	9	
8	Panmud Permohonan	8	
9	Panmud Hukum	12	
10	Juru Sita	9	
11	Kasubag Kepegawaian	20	
12	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	18	
13	Kasubag Umum Dan Keuangan	24	
14	Juru Sita	8	
15	Juru Sita Pengganti	8	

Tabel 2.9
Matriks SKP Pengadilan Agama Muara Tebo

NO	NAMA	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN 2017
1	Drs. Asli Nasution, M.E.Sy	Ketua	41
2	Saifullah Anshari	Wakil Ketua	18
3	Asrori Amin, S.H.I., M.H.	Hakim	16
4	Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.	Hakim	16
5	Izzami Thaufiq, S.H., M.H.	Panitera	18
6	Rajani, S.Ag., M.E.Sy	Sekretaris	18
7	Widarli, S.Ag	Wakil Panitera	16
8	Nur Amri, S.H.	Panmud Hukum	11
9	M. Yusuf, S.H.I	Panmud Gugatan	8
10	Akmad Khumaidi, S.H.I	Panmud Permohonan	8
11	Jufri Azhari, S.Sy	Kasubag Umum Dan Keuangan	8
12	Yudi Mardiansyah, S.Kom.	Kasubag Perenc, IT, & Pelaporan	8
13	Agustiar, A.Md	Jurusita	8
14	Riduansyah	Jurusita	8
15	Yuli Hartini	JuruSita Pengganti	8
16	Fauzana, S.E	Staf	11

Tabel 2.10
Matriks SKP Pengadilan Agama Muara Bungo

NO	NAMA	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN 2017
1	Dra. Hj. Asmidar	Ketua	40
2	Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H.	Wakil	35

3	Ahmad Patrawan, S.H.I.	Hakim	27
4	Dani Ramdani, S.H.I.,M.H.	Hakim	13
5	Rio Satria, S.H.I.,M.E.Sy.	Hakim	26
6	Rinaldi. M, S.H.I.	Hakim	22
7	Ghozi, S.Ag.,M.A.	Panitera	35
8	Hoiriah, S.Ag	Sekretaris	18
9	Tet Tazani, S. Ag	Wakil Panitera	16
10	Zulpikar, S.H.I.,M.H.I.	Panmud Gugatan	19
11	Hazizah, S.Sy.	PP/Plt Panmud Hukum	13
12	Rani Irvan, S.H.	PP/Plt Panmud Permohonan	7
13	Lara Harnita, S.H.I.	PP/Kasir	27
14	Asnawi, S.H.	Panitera Pengganti	32
15	Zulpitri	Jurusita	10
16	Herlin Qomara Sari, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	19
17	Deri Praja Kusuma, S.Kom	Kasubbag Umum dan Keuangan	21
18	Maksor, S. Pd.i.	Plt Kasubbag Perenc IT, dan Pelaporan	22

Tabel 2.11
Matriks SKP Pengadilan Agama Bangko

NO	NAMA	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN 2017
1	Drs. Mahmud Dongoran, M.H	Wakil Ketua	20
2	Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag	Hakim	16
3	Suspawati, S.Ag	Hakim	13
4	Milda Sukmawati, S.H.I	Hakim	13
5	Drs. Dahkir A	Panitera	25
6	Arlis, S.H.I.	Wakil Panitera	10
7	Zari Wardana, S.H.I., M.E.Sy.	Panitera Muda Hukum	11
8	Sri Wahyuni, S.H.I.	Panitera Muda Gugatan	16
9	Ikhwanul karim, BA	Panitera Muda Permohonan	7
10	Husni Jayadi, S.Ag., M.H	Panitera Pengganti	21
11	Witman, S.H.I., M.H.	Jurusita	11
12	Samardin, S.H.I.	Jurusita	4
13	Kiki Wardiana, S.T.	Sekretaris	17
14	Syafrianto, S.Ag., M.M.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	19
15	M. Ramli, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	14
16	Azhar Amir, S.H., M.H.	Kasubbag Umum Ortala	15
17	Sutopo, S.Kom., M.H.	Kasubbag Perenc, IT dan Pelaporan	13

Tabel 2.12
Matriks SKP Pengadilan Agama Sungai Penuh

NO	NAMA	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN 2017
1	A. Syarkawi, S.Ag, M.H.	Wakil Ketua	21
2	Wisri, S.Ag	Hakim	14
3	Ramadaniar, S.HI, M.H.	Hakim	14
4	Ahmad Syafruddin, S.HI, M.H.	Hakim	14
5	Genius Virades, SH	Hakim	11
6	Ridho Afrianedy, S.HI	Hakim	11
7	Drs. Auza'I, M.H.	Panitera	17
8	Maidariati, SH	Sekretaris	16
9	Arlis, S.Ag	Wakil Panitera	15
10	Erwan Pani, SH	Panmud. Gugatan	13
11	Drs. Khairuddin	Panmud. Hukum	13
12	Noprizal, S.HI	Panmud. Permohonan	13
13	Lasminar, S.HI	Kasubbag. Umum & Keu.	20
14	Harum Sahar, SE	Kasubbag. Kep. & Ortala	28
15	Ulil Amri, S.HI	Kasubbag. Peren. IT & Pel.	8
16	Halimah, S.Ag	PP	12
17	Hasyimi, BA	PP	12
18	Sa'adah, S.Ag	PP	12
19	Buhari	Jurusita	11
20	Ade Winarta, SE	Jurusita	11
21	Egi MMF, S.Kom	Staf	17
22	Siti Fatimah Sugiran, A.Md.	Staf	14

B. Pelayanan Publik yang Prima

a. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) merupakan salah satu mekanisme pengaturan (regulasi) yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Peran Pengadilan Tinggi Agama dalam SAPM sebagai Pembina PA/MS, sedangkan peran pusat sebagai regulator. Pelaksanaan SAPM PA/MS dilakukan oleh Komite SAPM PA/MS yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Unsur yang dinilai dalam SAPM meliputi administrasi manajemen, administrasi kesekretariatan, administrasi kepaniteraan, serta sarana dan

prasarana. Untuk meraih sertifikat akreditasi jaminan mutu dalam rentang waktu yang relatif singkat diperlukan taktik yang efisien dan efektif serta dukungan total dari seluruh anggota organisasi.

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu untuk tahap pertama telah dilewati, dimana dari 98 Pengadilan Agama yang telah mendapat sertifikat di seluruh Indonesia, wilayah PTA Jambi ada 3 (tiga) PA yang berhasil mendapatkan sertifikat dengan nilai A Excellent, yaitu Pengadilan Agama Muara Bulian kelas Ib, Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan Pengadilan Agama Muara Bungo. Adapun 7 (tujuh) PA yang belum mendapatkan SAPM akan dilakukan pembenahan sehingga dapat ikut sertakan di tahun 2018.

b. Posbakum

Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah menyediakan Pos Pelayanan Hukum untuk masyarakat pencari Keadilan yang tidak mampu ada 3 PA, yaitu Pengadilan Agama Jambi kelas Ia, Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan Pengadilan Agama Bangko, yang mana 3 Pa tersebut telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum di wilayah Provinsi Jambi.

c. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama wilayah PTA Jambi telah melaksanakan salah satu program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan untuk membantu masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Kegiatan sidang diluar gedung di bagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan sidang keliling dan sidang terpadu, dari 10 PA di wilayah Jambi ada 3 PA yang telah melaksanakan sidang terpadu yaitu Pengadilan Agama Jambi, Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan Pengadilan Agama Muara Bungo dan telah bekerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah terkait di satker tersebut.

d. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2017 akses masyarakat miskin atau tidak mampu terus difasilitasi oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu program prioritas Mahkamah Agung dan juga prioritas Negara. Dibawah payung hukum mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA NOMOR 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum salah satunya bantuan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo). Adapun untuk wilayah PTA Jambi di tiap satker telah ada anggaran khusus untuk program pembebasan biaya perkara dan telah melaksanakan program tersebut dengan jumlah perkara Prodeo yang di tangani berjumlah 124 perkara prodeo.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pokok bagi satu organisasi dan sangat menentukan bagi keberhasilan tujuan bagi organisasi tersebut. Peran sumber daya manusia (SDM) bila dikaitkan dengan lembaga peradilan merupakan lembaga yang terhormat, dengan tujuan pokok menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 merupakan peranan yang tidak saja penting secara organisasi tetapi juga menyangkut faktor-faktor filosofis dan sosiologis. Secara umum, sumber daya manusia (SDM) peradilan dapat dikategorikan pada dua kelompok. Kelompok pertama adalah sumber daya manusia teknis yudisial yang terdiri dari Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti. Adapun kelompok kedua adalah sumber daya manusia non teknis yudisial yang terdiri dari Sekretaris, Kabag, Kasubbag dan para pegawai umumnya.

Untuk tahun 2017 sumber daya manusia teknis yudisial dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi terdiri dari Hakim Tingkat Banding berjumlah 13 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, Hakim Tingkat Pertama kelas IA berjumlah 19 (Sembilan belas) Orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Hakim Tingkat Pertama Kelas IB berjumlah 17 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Hakim Tingkat Pertama kelas II berjumlah 30 (tiga puluh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Panitera Dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi Panitera berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Panitera Pengadilan Tingkat Banding, Panitera Muda dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang termasuk Panitera Muda Pengadilan Tingkat Banding, Panitera Pengganti dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi berjumlah 52 (lima puluh dua) orang, Jurusita/Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Jurusita berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang sedangkan Jurusita Pengganti berjumlah 9 (sembilan) orang.

Sedangkan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial di tahun 2017 terdiri dari Sekretaris berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Kepala Bagian 2 (dua) orang, Kepala Sub Bagian berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang. Sedangkan Fungsional Umum/Staf sejumlah 25 (dua puluh lima) orang.

a. Mutasi

- Mutasi Jabatan

Mutasi atau transfer adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu Lembaga atau organisasi. Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintahan.

Mutasi Jabatan dalam tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama telah diproses dan telah terealisasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar Pegawai yang Mutasi
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2017

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Drs. H. Mukhlis, SH, M.Hum	19560226.198303.1.001	IV/e	Wakil Ketua PTA Mataram	Ketua PTA Jambi
2	Drs. H. Ibrahim Kardi, SH, M.Hum	19550816.198103.1.004	IV/e	Hakim Tinggi PTA Jakarta	Wakil Ketua PTA Jambi
3	Dr. H. Harun S, SH, MH	19560725.197903.1.010	IV/e	Wakil Ketua PTA Jambi	Wakil Ketua PTA Surabaya
4	Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH, MH	19580705.198603.1.001	IV/d	Hakim Tinggi PTA Jambi	Wakil Ketua PTA Bengkulu

5	Drs. Asli Nasution, M.E.Sy	19620924.199202.1.001	IV/b	Wakil Ketua PA Sengeti Kelas IB	Ketua PA Ma. Tebo Kelas II
6	Drs. M. Rasyid, SH, MH	19660509.199403.1.004	IV/b	Ketua PA Bangko Kelas IB	Ketua PA Tanjung Pandan Kelas IB
7	H. Samsul Fadli, SPD, SH	19690402.199202.1.001	IV/b	Wakil Ketua PA Ma. Bulian Kelas IB	HPA Tigaraksa Kelas IA
8	Drs. H. Afrizal	19581208.199203.1.004	IV/c	Ketua PA Ma. Bulian Kelas IB	HPA Batusangkar Kelas IB
9	Drs. M. Jhon Afrizal, SH, MH	19621223.199403.1.002	IV/b	KPA Sengeti Kelas IB	HPA Medan Kelas IA
10	Saifullah Anshari, S.Ag, M.Ag	19750712.200502.1.001	III/d	HPA Sengeti Kelas IB	Wakil Ketua PA Ma. Tebo Kelas II
11	Korik Agustian, S.Ag, M.Ag	19750827.200604.1.003	III/d	HPA Sengeti Kelas IB	Wakil Ketua PA Sarolangun Kelas II
12	Hj. Baihna, S.Ag, MH	19740720.200012.2.003	III/d	HPA Sengeti Kelas IB	Wakil Ketua PA Kuala Tungkal Kelas II
13	Senen, S.Ag, MH	19700515.199703.1.002	IV/b	Wakil Ketua PA Kuala Tungkal Kelas II	Ketua PA Kuala Tungkal Kelas II
14	Drs. H. Mhd. Dongan	19640606.199403.1.006	IV/b	Ketua PA Kuala Tungkal Kelas II	HPA Medan Kelas IA
15	Drs. H. Djahidin	19550318.199303.1.002	IV/b	Ketua PA Sungai Penuh Kelas II	HPA Jambi Kelas IA
16	Akhmad Kholil Irfan, S.Ag, SH, MH	19730626.199803.1.001	IV/a	HPA Sungai Penuh Kelas II	Wakil Ketua PA Tanjung Pati Kelas II
17	Dra. Ernawati, SH	19620726.199403.2.002	IV/b	Wakil Ketua PA Ma. Tebo Kelas II	Ketua PA Solok Kelas II
18	Drs. Mahmud Dongoran, MH	19670514.199303.1.005	IV/c	Wakil Ketua PA Tanjung Pinang Kelas IA	Wakil Ketua PA Bangko Kelas IB
19	Elvin Nailana, SH, MH	19690227.198803.1.002	IV/c	Wakil Ketua PA Temanggung Kelas IB	Ketua PA Ma. Bulian Kelas IB
20	Dra. Siti Fatimah, M.Sy	19581219.199403.2.002	IV/b	HPA Bangkinan Kelas IB	Wakil Ketua PA Ma. Sabak Kelas II
21	Dra. Hj. Sy. Ummi kalsum	19581025.199402.2.001	III/d	Panmud Permohonan PA Jambi Kelas IA	Panitera Pengganti PTA Jambi
22	Dian Sari Wulandari, S.Ag	19750531.200112.2.002	III/d	Panitera PA Ma. Sabak Kelas II	Panitera Pengganti PTA Jambi
23	Nur Mulyanti, SH	19750418.199603.2.001	III/d	Panitera Pengganti PA Jambi Kelas IA	Panitera Pengganti PTA Jambi
24	Ahmad Tarmizi, SH, MH	19740317.200312.1.003	III/d	Panitera Pengganti PA Jambi Kelas IA	Panmud Permohonan PA Jambi Kelas IA
25	Yulizar, Sy, S.Pd, MH	19681225.200212.1.002	III/d	Jurusita PA Ma. Bulian Kelas IB	Jurusita PA Kuala Tungkal Kelas II
26	Agustiar, A.Md	19831029.201101.1.006	II/d	JSP PA Ma. Tebo Kelas II	Jurusita PA Ma. Tebo Kelas II
27	Yusri	19760405.200312.1.006	II/d	JSP PA Ma. Bulian Kelas IB	Jurusita PA Sarolangun Kelas II
28	Sri Maryenti	19800610.200312.2.001	II/d	JSP PA Ma. Bulian Kelas IB	Jurusita PA Ma. Bulian Kelas IB
29	Kiki Wardania, ST	19831027.200904.2.004	III/b	JSP PA Bangko Kelas IB	Jurusita PA Bangko Kelas IB
30	Drs. Pitir	19641018.199303.1.002	IV/a	Wapan PA Jambi Kelas IA	Panitera Pengganti PA Jambi Kelas IA
31	Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, SH	19580108.198003.2.001	III/d	Panitera Pengganti PTA Jakarta	Panitera Pengganti PTA Jambi
32	Mastuhi, S.Ag, MH	19770410.200112.1.004	III/c	Staf PTA Jambi	Staf PA Tanjung Karang Kelas IA
33	Maksor, S.Pdi	19790507.200312.1.004	III/a	Staf PTA Jambi	Staf PA Ma. Bungo Kelas II
34	Angga Setiawan Rahardi, SH	198707012006041002	III/b	Kasub bag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Sengeti kelas IB	Kasub Bag Umum & Keuangan PA Sengeti Kelas IB
35	Rindom Ridona, S.HI	19870521.200604.1.002	III/b	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Sengeti Kelas IB	Kasub Bag Perencanaan, TI, & Pelaporan PA Sengeti Kelas IB

36	Hj. Mayatu Sofia, SH, MH	19650307.198602.2.001	IV/a	Kasub Bag Kepegawaian & TI PTA Jambi	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Jambi
37	Muthiya Sari, S.Sos	19790829.200604.2.004	III/c	Staf PTA Jambi	Kasub Bag Kepegawaian & TI PTA Jambi
38	H. Solikun, S.Sos.I, SH	19730526.199202.1.001	III/c	Kasub Bag Umum & keuangan PA Sengeti Kelas IB	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Sengeti Kelas IB
39	Azhar Amir, SH	19841013.200604.1.004	III/b	Kasub Bag Umum & keuangan PA Ma. Tebo Kelas II	Kasub Bag Umum & keuangan PA Bangko Kelas IB
40	Niska Zanita, S.E.I	19820327.200704.2.001	III/c	Sekretaris PA sengeti Kelas IB	Kasub Bag Umum & keuangan PA Jambi Kelas IA
41	M. Ramli, SH	19690507.200312.1.003	III/d	Kasub Bag Umum & Keuangan PA Ma. Sabak Kelas II	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Bangko Kelas IB
42	Deri Praja Kusuma, S.Kom	19830428.201101.1.005	III/a	JSP PA Ma. Bungo Kelas II	Kasub Bag Umum & Keuangan PA Ma. Bungo Kelas II
43	Herlin Qomara Sari, SE	19860927.200912.2.005	III/b	Kasub Bag Umum & Keuangan PA Ma. Bungo Kelas II	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Ma. Bungo Kelas II
44	Yudhistira Adi Pinto, SE	19811016.200604.1.005	III/c	Kasub Bag Keuangan & Pelaporan PTA Jambi	Sekretaris PA Sengeti Kelas IB
45	Abdul Rachman, SE	19830813.201101.1.005	III/b	Staf PTA Jambi	Kasub Bag Perencanaan, TI, & Pelaporan PA jambi Kelas IA
46	Fadli, SH, MH	19810510.200502.1.002	III/a	Staf PTA Jambi	Kasub Bag Umum & Keuangan PA Ma. Sabak Kelas II
47	Jufri Azhari, S.Sy	19880302.201403.1.001	III/a	Staf PTA Jambi	Kasub Bag Umum & Keuangan PA Ma. Tebo Kelas II
48	Budi Barliansyah, SE	19790525.200604.1.006	III/c	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Jambi Kelas IA	Kasub Bag Keuangan & Pelaporan PTA Jambi
49	Muhammadiyah, S.Th.I, M.H.I	19800816.200312.1.004	III/c	Kasub Bag Perencanaan, TI, & Pelaporan PA jambi Kelas IA	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Jambi Kelas IA
50	Egi Mochammad Mugni Fahrozi, S.Kom	19890604.201503.1.001	III/a	Staf PA ma. Bungo Kelas II	Staf PA Sungai Penuh Kelas II

- Mutasi Pangkat

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara. Selain dari pada itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan

kepada PNS untuk lebih meningkatkan pengabdianya. Oleh karena itu kenaikan pangkat diberikan pada orang yang tepat dan tepat waktunya.

Mutasi kenaikan pangkat dalam tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama telah diproses dan telah terealisasi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pegawai yang terbagi dalam dua periode yaitu periode April dan periode Oktober dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Pegawai yang Naik Pangkat
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2017

NO	NAMA	NIP	GOL		UNIT KERJA	STATUS
			LAMA	BARU		
	Tenaga Teknis					
1	Drs. Muslim, SH, MH	19580222.198803.1.001	IV/d	IV/e	PTA Jambi	√
2	Drs. M. Nasir Daud	19520814.198503.1.002	IV/d	IV/e	PTA Jambi	√
3	Kamal Mukhtar, S.Ag	19530711.198003.1.003	IV/c	IV/d	PA Jambi	√
4	Saifullah Anshari, S.Ag, M.Ag	19750712.200502.1.001	III/c	III/d	PA Sengeti	√
5	Drs. H. Afrizal	19581208.199203.1.004	IV/b	IV/c	PA Ma. Bulian	√
6	Taufik Rahayu Syam, S.HI, M.SI	19860604.200912.1.003	III/b	III/c	PA Ma. Bulian	√
7	Dra. Hj. Hasnaini, SH, MH	19630811.200012.2.001	III/d	IV/a	PA Ma. Bungo	√
8	Ahmad Patrawan, S.HI	19841127.200904.1.005	III/b	III/c	PA Ma. Bungo	√
9	Rinaldi M, S.HI	19830102.200904.1.008	III/b	III/c	PA Ma. Bungo	√
10	Rio Satria, S.HI, M.SE.Sy	19860606.200904.1.003	III/d	IV/a	PA Ma. Bungo	√
11	Dani Ramdani, S.H.I, MH	19850828.200904.1.004	III/b	III/c	PA Ma. Bungo	√
12	Drs. Indrawisol	19620913.199303.1.004	IV/b	IV/c	PA Ma. Sabak	√
13	Drs. Abd Rahman, MH	19570717.199303.1.001	IV/b	IV/c	PA Ma. Sabak	√
14	Sulistianingtias Wibawanty, SH	19770224.200012.2.001	III/d	IV/a	PA Ma. Sabak	√
15	Senen, S.Ag, MH	19700515.199703.1.002	IV/a	IV/b	PA Kuala Tungkal	√
16	Drs. Abd. Rahman Usman, SH	19551231.198203.1.081	IV/d	IV/e	PTA Jambi	√
17	H. Samsul Fadli, S.Pd, SH	19690402.199202.1.001	IV/a	IV/b	PA Ma. Bulian	√
18	Drs. H. Djahidin	19550318.199303.1.002	IV/c	IV/d	PA Sungai Penuh	√
19	Henry Hanafi, SH, MH	19690512.199802.1.001	III/d	IV/a	PTA Jambi	√
20	Mawardi, SH, MH	19670210.199303.1.004	III/d	IV/a	PTA Jambi	√
21	Hj. Yahidah, SH, MH	19570416.198103.2.001	III/d	IV/a	PTA Jambi	√
22	Drs. Zubir Ishak, SH, MH	19580705.199403.1.003	III/d	IV/a	PTA Jambi	X
23	Drs. Namlis, MH	19600809.199303.1.001	III/d	IV/a	PTA Jambi	√
24	Desy Ferawaty, SE, MH	19771215.200904.2.001	III/b	III/c	PA Jambi	√
25	Hudori, S.Ag, MH	19671221.199803.1.005	III/d	IV/a	PA Ma. Bulian	√

26	Septi Rianti, SH	19790928.200904.2.001	III/b	III/c	PA Ma. Bulian	√
27	Siti Azizah, S.HI	19780603.200502.2.001	III/a	III/b	PA Ma. Bulian	√
28	Lara Harnita, SHI	19900115.201212.2.001	III/a	III/b	PA Ma. Bungo	√
29	Kiki Wardania, ST	19831027.200904.2.004	III/b	III/c	PA Bangko	√
30	Drs. Said Hasan A, MH	19640707.199403.1.007	III/d	IV/a	PA Sengeti	√
31	Arief Mustaqim, SE.I, M.Sy	19820317.200904.1.003	III/b	III/c	PA Sengeti	√
32	Muhammad Faizal, A.Md	19751214.200805.1.002	II/d	III/a	PA Sengeti	√
33	Syahrin Mubarak, SH	19811020.200904.1.006	II/d	III/a	PA Sarolangun	√
34	Sanusi Pane, S.HI	19740609.199403.1.003	III/c	III/d	PA Ma. Sabak	√
35	Sunarti, SH	19781217.200312.2.003	III/a	III/b	PA Ma. Sabak	√
36	Kamal Shaputra, SH	19820706.200904.1.002	III/b	III/c	PA Ma. Sabak	√
37	Umarriadh Bafadhal, S.HI	19821017.200904.1.002	III/b	III/c	PA Sengeti	√
38	Erwan, SH	19770621.200904.1.003	III/b	III/c	PA Sengeti	√
39	Drs. Dahkir A	19651208.199401.1.001	III/d	IV/a	PA Bangko	√
40	Romi Herusman Saputra	19870207.200604.1.002	III/b	III/c	PA Sengeti	√
41	Lestri Handayani, SH, MH	19811011.200904.2.009	III/b	III/c	PA Ma. Sabak	√
42	Ismiatun, S.Pd	19780504.200604.2.003	III/b	III/c	PA Sengeti	√
43	Hj. Sayang, S.HI, M.HI	19750721.200312.2.004	III/c	III/d	PA Jambi	√
	Tenaga Non Teknis					
1	Hj. Mayatu Sofia, SH, MH	19650307.198602.2.001	III/d	IV/a	PTA Jambi	√
2	Sapi'i, S.Ag., M.H.	19750602.200112.1.003	III/d	IV/a	PA Jambi	√
3	Lasminar, S.H.I.	19770604.200502.2.001	III/c	III/d	PA Sungai Penuh	√
4	Gusmi Yanti Fitriani,SH	19780830.200912.2.001	II/d	III/a	PTA Jambi	√
5	Doni Dirmansyah, SH	19830621.201212.1.001	III/a	III/b	PA Sarolangun	√
6	Suhardi, S.Kom	19820831.200904.1.002	III/b	III/c	PA Ma. Sabak	√
7	Novriandi, S.Kom	19821101.200904.1.001	III/b	III/c	PA Ma. Bulian	√
8	Wiwit Rahmadhani, SE, ME.Sy	19840612.200904.2.003	III/b	III/c	PTA Jambi	√
9	Afra Desmiarlen, S.HI	19871204.201212.2.002	III/a	III/b	PA Jambi	√
10	Fenny Yuli Yanti, SH	19811026.201212.2.002	III/a	III/b	PA Jambi	√
11	Dra. Nur'aini	19691002.199903.2.001	III/d	IV/a	PA Ma. Bulian	√
12	Aliyanto, S.Kom	19821211.200604.1.004	III/b	III/c	PA Ma. Bulian	√
13	Fadli, SH, MH	19810510.200502.1.002	III/a	III/b	PTA Jambi	√
14	Rovel Rinaldi, S.HI, M.H	19880422.201403.1.003	III/a	III/b	PTA Jambi	√
15	Angga Setiawan Rahardi, SH, MH	19870701.200604.1.002	III/b	III/c	PA Sengeti	√

- Mutasi / Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak melaksanakan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan CPNS untuk formasi calon hakim baru dilaksanakan pada bulan November 2017.

b. Promosi

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah. Pada tahun 2017 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilaksanakan Promosi jabatan untuk menempati jabatan yang belum terisi dan mengisi kekosongan jabatan yang dikarenakan adanya rotasi guna penyegaran suasana kerja. Adapun Promosi jabatan yang telah terealisasi dalam tahun 2017 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Daftar Pegawai yang Mendapat Promosi
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2017

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Drs. H. Mukhlis, SH, M.Hum	19560226.198303.1.001	IV/e	Wakil Ketua PTA Mataram	Ketua PTA Jambi
2	Drs. H. Ibrahim Kardi, SH, M.Hum	19550816.198103.1.004	IV/e	Hakim Tinggi PTA Jakarta	Wakil Ketua PTA Jambi
3	Dr. H. Harun S, SH, MH	19560725.197903.1.010	IV/e	Wakil Ketua PTA Jambi	Wakil Ketua PTA Surabaya
4	Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH, MH	19580705.198603.1.001	IV/d	Hakim Tinggi PTA Jambi	Wakil Ketua PTA Bengkulu
5	Drs. Asli Nasution, M.E.Sy	19620924.199202.1.001	IV/b	Wakil Ketua PA Sengeti Kelas IB	Ketua PA Ma. Tebo Kelas II
6	Saifullah Anshari, S.Ag, M.Ag	19750712.200502.1.001	III/d	HPA Sengeti Kelas IB	Wakil Ketua PA Ma. Tebo Kelas II
7	Korik Agustian, S.Ag, M.Ag	19750827.200604.1.003	III/d	HPA Sengeti Kelas IB	Wakil Ketua PA Sarolangun Kelas II
8	Hj. Baihna, S.Ag, MH	19740720.200012.2.003	III/d	HPA Sengeti Kelas IB	Wakil Ketua PA Kuala Tungkal Kelas II
9	Senen, S.Ag, MH	19700515.199703.1.002	IV/b	Wakil Ketua PA Kuala Tungkal Kelas II	Ketua PA Kuala Tungkal Kelas II
10	Akhmad Kholil Irfan, S.Ag, SH, MH	19730626.199803.1.001	IV/a	HPA Sungai Penuh Kelas II	Wakil Ketua PA Tanjung Pati Kelas II
11	Dra. Ernawati, SH	19620726.199403.2.002	IV/b	Wakil Ketua PA Ma. Tebo Kelas II	Ketua PA Solok Kelas II
12	Elvin Nailana, SH, MH	19690227.198803.1.002	IV/c	Wakil Ketua PA Temanggung Kelas IB	Ketua PA Ma. Bulian Kelas IB

13	Dra. Siti Fatimah, M.Sy	19581219.199403.2.002	IV/b	HPA Bangkinan Kelas IB	Wakil Ketua PA Ma. Sabak Kelas II
14	Dra. Hj. Sy. Ummi kalsum	19581025.199402.2.001	III/d	Panmud Permohonan PA Jambi Kelas IA	Panitera Pengganti PTA Jambi
15	Dian Sari Wulandari, S.Ag	19750531.200112.2.002	III/d	Panitera PA Ma. Sabak Kelas II	Panitera Pengganti PTA Jambi
16	Nur Mulyanti, SH	19750418.199603.2.001	III/d	Panitera Pengganti PA Jambi Kelas IA	Panitera Pengganti PTA Jambi
17	Ahmad Tarmizi, SH, MH	19740317.200312.1.003	III/d	Panitera Pengganti PA Jambi Kelas IA	Panmud Permohonan PA Jambi Kelas IA
18	Agustiar, A.Md	19831029.201101.1.006	II/d	JSP PA Ma. Tebo Kelas II	Jurusita PA Ma. Tebo Kelas II
19	Yusri	19760405.200312.1.006	II/d	JSP PA Ma. Bulian Kelas IB	Jurusita PA Sarolangun Kelas II
20	Sri Maryenti	19800610.200312.2.001	II/d	JSP PA Ma. Bulian Kelas IB	Jurusita PA Ma. Bulian Kelas IB
21	Kiki Wardania, ST	19831027.200904.2.004	III/b	JSP PA Bangko Kelas IB	Jurusita PA Bangko Kelas IB
22	Hj. Mayatu Sofia, SH, MH	19650307.198602.2.001	IV/a	Kasub Bag Kepegawaian & TI PTA Jambi	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Jambi
23	Muthiya Sari, S.Sos	19790829.200604.2.004	III/c	Staf PTA Jambi	Kasub Bag Kepegawaian & TI PTA Jambi
24	Azhar Amir, SH	19841013.200604.1.004	III/b	Kasub Bag Umum & keuangan PA Ma. Tebo Kelas II	Kasub Bag Umum & keuangan PA Bangko Kelas IB
25	M. Ramli, SH	19690507.200312.1.003	III/d	Kasub Bag Umum & Keuangan PA Ma. Sabak Kelas II	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Bangko Kelas IB
26	Deri Praja Kusuma, S.Kom	19830428.201101.1.005	III/a	JSP PA Ma. Bungo Kelas II	Kasub Bag Umum & Keuangan PA Ma. Bungo Kelas II
27	Yudhistira Adi Pinto, SE	19811016.200604.1.005	III/c	Kasub Bag Keuangan & Pelaporan PTA Jambi	Sekretaris PA Sengeti Kelas IB
28	Abdul Rachman, SE	19830813.201101.1.005	III/b	Staf PTA Jambi	Kasub Bag Perencanaan, TI, & Pelaporan PA jambi Kelas IA
29	Fadli, SH, MH	19810510.200502.1.002	III/a	Staf PTA Jambi	Kasub Bag Umum & Keuangan PA Ma. Sabak Kelas II
30	Jufri Azhari, S.Sy	19880302.201403.1.001	III/a	Staf PTA Jambi	Kasub Bag Umum & Keuangan PA Ma. Tebo Kelas II
31	Budi Barliansyah, SE	19790525.200604.1.006	III/c	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Jambi Kelas IA	Kasub Bag Keuangan & Pelaporan PTA Jambi

c. Pensiun

Pensiun sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 10 disebutkan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pensiun dilaksanakan untuk menjamin produktivitas kerja suatu instansi atau perusahaan agar tetap seimbang mengingat semakin bertambahnya usia maka produktivitas kerjanya pun akan menurun. Dengan adanya program pensiun maka perencanaan pembinaan masa depan seorang pegawai setelah pensiun dapat terjamin

Terdapat beberapa pengertian mengenai pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Kondisi dimana seorang Pegawai Negeri Sipil tidak bekerja lagi karena berbagai hal.
2. Pensiun merupakan jaminan dihari tua dan sebagai jasa terhadap pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.
3. Berdasarkan prinsipnya, pensiun menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya dan untuk setiap pegawai negeri sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang berbentuk oleh pemerintah.

Pensiun memiliki beberapa tujuan bagi para Pegawai Negeri Sipil, antara lain :

1. Pensiun sebagai balasan jasa yang berbentuk nyata dari pemerintah kepada pegawai negeri.
2. Pensiun sebagai jaminan pada hari tua.

Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai, apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan.

Pensiun akan diberikan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai :

1. Telah mencapai usia kurang lebih 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun kurang lebih selama 20 tahun.
2. Memiliki masa kerja kurang lebih 4 tahun dan oleh badan atau pejabat yang telah ditunjuk oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan mengenai pengujian kesehatan para pegawai negeri, yang dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena dalam menjalankan tugas kewajiban jabatannya.
3. Diberhentikan secara hormat sebagai pegawai negeri sipil dan pada saat pemberhentiannya mereka telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

Pada tahun 2017 ini di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sudah ada 8 (delapan) orang yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). Selain itu terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang diusulkan pensiunnya lebih cepat sebelum mencapai batas usia pensiun (BUP) dikarenakan pegawai yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Tabel 3.4
Daftar Pegawai yang Telah Mencapai
Batas Usia Pensiun (BUP) Tahun 2017

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	UNIT KERJA	TMT PENSIUN
1	Drs. Djazril Darwis	19500226.197703.1.002	Pembina Utama/(IV/e)	Hakim Tinggi	PTA Jambi	01-03-2017
2	Husnul Arifin, S. Ag	19500206.197903.1.003	Pembina Utama Madya/(IV/d)	Hakim Tinggi	PTA Jambi	01-03-2017
3	Drs. H. Mahmuddin Rasyid, M.H.	19500210.197803.1.001	Pembina Utama/(IV/e)	Hakim Tinggi	PTA Jambi	01-03-2017
4	Amiruddin, S.H.I	19590201.199402.1.001	Penata Tk. I/(III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	PA Bangko	01-03-2017
5	Nazaruddin	19570422.198003.1.003	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Panmud Permohonan	PA Kuala Tungkal	01-05-2017
6	Hilmi, S. Ag	19570727.199402.1.001	Penata Tk.I/(III/d)	Panitera Pengganti	PA Sungai Penuh	01-08-2017
7	Drs. Agus Salim	19570810.1996031.001	Penata Tk.I/(III/d)	Panmud Hukum	PA Muara Bungo	01-09-2017
8	Syaifuddin, S. Ag	19571108.199203.1.001	Penata Tk. I / (III/d)	Panitera Pengganti	PA Sungai Penuh	01-12-2017

Tabel 3.5
Daftar Pegawai yang Pensiun
Karena Meninggal Dunia

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	UNIT KERJA	TMT PENSIUN
1	Drs. Ahmad Sufri Hamid, S.H	19560402.198403.1.003	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Hakim	PA Jambi	12-02-2017
2	Muzani, S. Ag.	19700102.199402.1.001	Penata Tk.I / (III/d)	Panitera Pengganti	PA Jambi	19-07-2017
3	H. Ahmad Zaini, S.H., M.H.	19620918.198303.1.008	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Panitera	PTA Jambi	28-07-2017

d. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia baik bidang Teknis Yustisial maupun Non Teknis yustisial, selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang, Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga mengirim Hakim/Pegawai untuk mengikuti pelatihan, diklat dan sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun instansi lain diantaranya adalah :

- **Bidang Kepaniteraan**

1. Bimbingan Teknis untuk Training of Trainer (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahap I yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI:
 - Dilaksanakan berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0858/DjA.3/PP.00.3/3/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, tanggal 21 s.d 24 Maret 2017;
 - Tempat di Hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat;
 - Peserta adalah Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Vina Amrina dan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo, Ghozi, S.Ag., M.Ag.

2. Mengikuti Fit dan Proper Test Pimpinan (Ketua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Klas IB tahun 2017:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2122/DJA/HM.00/04/2017;
- Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja, tanggal 8 s/d 11 Mei 2017;
- Tempat di Hotel Red Top Jakarta;
- Peserta Ketua Pengadilan Agama Bangko, Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.; Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Drs. H. Afrizal; Ketua Pengadilan Agama Sengeti Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

3. Mengikuti Fit dan Proper Test Pimpinan (Wakil Ketua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Klas IB tahun 2017:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2122/DJA/HM.00/04/2017;
- Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja, tanggal 8 s/d 11 Mei 2017;
- Tempat di Hotel Red Top Jakarta;
- Peserta Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian, H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengeti, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor: 596/Bld.3/Dik/S/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
- Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari, tanggal 30 Oktober s.d 4 November 2017;
- Tempat di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat;

- Peserta adalah Jurusita Pengadilan Agama Jambi, Ahmad Yahya, S.H.
- 5. Kegiatan Profil Assessment dan Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kelas IB:
 - Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 3891/DjA/HM.00/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 7 s/d 10 November 2017;
 - Tempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat;
 - Peserta Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.
- 6. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah seluruh Indonesia:
 - Dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor : 595/Bld.3/Dik/S/10/2017 Tanggal 19 Oktober 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari mulai tanggal 23 Oktober s/d 7 November 2017;
 - Tempat di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat;
 - Peserta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. Asri Damsy, S.H., M.H.
- 7. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia:
 - Dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor : 716/Bld.3/Dik/S/11/2017 Tanggal 3 November 2017 dan Surat Nomor: 777/Bld.3/Dik/S/11/2017 Tanggal 10 November 2017 ;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai tanggal 13 s/d 18 November 2017.

- Tempat di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor;
 - Peserta Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jambi, Dra. Khoiriyah, Rosmala, S.Ag., M.H.I., dan Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I.
8. Pelatihan Ujicoba Aplikasi SIPP versi 3.2.0 tahun 2017:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 283/BUA/HM.02.3/11/2017 Tanggal 16 November 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 27 s/d 30 November 2017;
 - Tempat di Hotel Santika Mega City, Bekasi, Jawa Barat;
 - Peserta adalah Staf Panitera Muda Banding, Tri Wahyuni, S.Kom.
9. Program Pelatihan Bahasa Arab dan Hukum Syari'ah tahun 2017:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 4503/DJA.2/HM.00/12/2017 tanggal 6 Desember 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 18 s/d 21 Desember 2017;
 - Tempat di Kampus LIPIA Jakarta;
 - Peserta antara lain: Hakim Pengadilan Agama Sarolangun, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Darul Fadli, S.H.I, M.A., dan Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, Ridho Afrianedy, S.H.I, Lc.

• **Bidang Kesekretariatan**

1. Training of Trainer (TOT) / Tenaga Auditor Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2119/DJA/PP.01.3/4/2017 Tanggal 11 April 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 18 s.d 21 April 2017;

- Tempat di Hotel Grand Kanaya, Medan;
 - Peserta antara lain: Drs. S. Syekhan Al Jufri, Drs. Aidil Mujahid, Yudhistira Adi Pinto, S.E., Ahmad Ghufuran, S.E., M.M., Widianingsih, A.Md.
2. Pelatihan Analisa Beban Kerja (ABK) Tahun 2017:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 103/Bua.2/Kp.04.1/7/2017 Tanggal 10 Juli 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, tanggal 19 s/d 31 Juli 2017;
 - Tempat Pusdiklat Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Megamendung, Bogor;
 - Peserta adalah Kasub Bag Kepegawaian dan TI, Muthiya Sari, S.Sos. dan Staf Kepegawaian dan TI, Imam Nurwanto, S.H.I.
3. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2017 tingkat wilayah UAPPAW lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jambi Nomor: S-1265/WPB.06/BD.0501/2017 tanggal 12 Juli 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 18 Juli 2017;
 - Tempat Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi;
 - Pesertanya adalah Staf Sub Bag Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Fadli, S.H., M.H, dan Gusmi Yanti Fitriani, S.H.
4. Pembinaan Lanjutan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 3166/DjA/HM.00/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017;

- Kegiatan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 27 s.d 31 Agustus 2017;
 - Tempat di Pusdiklat Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung Bogor Jawa Barat;
 - Pesertanya adalah Kasub Bag Keuangan dan Pelaporan, Yudhistira Adi Pinto, S.E. dan Staf Panmud Bandung, Widianingsih, A.Md.
5. Pelatihan Asessor Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 3450/DjA/HM.00/09/2017 tanggal 14 September 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, pada tanggal 17 s/d 20 September 2017;
 - Tempat di Pusdiklat Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung Bogor Jawa Barat;
 - Pesertanya adalah Hakim Tinggi, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.
6. Kegiatan pemutakhiran data Tenaga Teknis Peradilan Agama Seluruh Indonesia pada Aplikasi Backup SIKEP:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 3555a/DjA.2/HM.00/09/2017 tanggal 27 September 2017 tanggal 27 September 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 11 s/d 14 Oktober 2017;
 - Tempat di Batam
 - Pesertanya adalah Kepala Sub Bag Kepegawaian dan TI, Muthiya Sari, S.Sos.
7. Sosialisasi Pengelolaan Hibah, SAKIP, dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2017:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 989/SEK/OT.00/11/2017 Tanggal 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 5 s/d 8 Desember 2017;
 - Tempat di Pusdiklat Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat;
 - Peserta antara lain: Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi, H. Idris Latif, S.H., M.H., Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H., PLT Panitera, Sahril, S.H., M.H.
8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Pegawai Tahun 2017:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 989/SEK/KP.00.2/11/2017 Tanggal 23 November 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2017;
 - Tempat di Pusdiklat Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat;
 - Peserta adalah Kasub Bag Kepegawaian dan TI, Muthiya Sari, S.Sos., dan Staf Pengadilan Tinggi Agama Jambi, M. Ukbah Rizal, S.Kom.
9. Pendidikan dan Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Angkatan XI dan XII Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung Tahun 2017:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Pusdilut Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor: 474/Bld.4/Pim/11/2017 Tanggal 17 November 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari pada tanggal 17 s/d 22 Desember 2017;

- Tempat di Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
- Peserta antara lain: Staf Sub Perencanaan Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Enita; Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Jambi, Abdul Rachman, S.E.; Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Sengeti, Rindom Ridona, S.H.I, M.H.; Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Muara Bulian, Novriandi, S.Kom., Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Muara Tebo, Yudi Mardiansyah, S.Kom.; PLT Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Muara Bungo, Maksor, S.Pd.I.; Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Bangko, Azhar Amir, S.H.; Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Sarolangun, Husaini, S.Kom.; Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Muhammad Zainuddin, S.H.; Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Muara Sabak, Dedi Arizal, S.E.

B. Penyelesaian Perkara

a. Jumlah sisa perkara yang diputus

Tingkat Banding

Sisa perkara banding yang belum diputus pada tahun 2016 sebanyak 2 perkara, perkara banding yang diterima di tahun 2017 sebanyak 22 perkara. Sehingga perkara yang ditangani di tahun 2017 berjumlah 24 perkara. Adapun perkara yang telah diselesaikan di tahun 2017 sebanyak 23 perkara (95,83%) masih ada sisa 1 perkara.

Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi tahun 2017 berasal dari:

1.	PA Jambi	:	11 Perkara
2.	PA Muara Bulian	:	1 Perkara
3.	PA Kuala Tungkal	:	0 Perkara
4.	PA Muara Bungo	:	1 Perkara
5.	PA Bangko	:	2 Perkara
6.	PA Sungai Penuh	:	2 Perkara
7.	PA Muara Sabak	:	2 Perkara
8.	PA Sarolangun	:	1 Perkara
9.	PA Sengeti	:	1 Perkara
10.	PA Muara Tebo	:	1 Perkara
	Jumlah	:	22 Perkara

Tingkat Pertama

Sisa perkara tingkat pertama yang belum diputus pada tahun 2016 sebanyak 662 perkara, perkara tingkat pertama yang diterima di tahun 2017 sebanyak 5309 perkara. Sehingga perkara yang ditangani di tahun 2017 berjumlah 5971 perkara. Adapun perkara yang telah diselesaikan di tahun 2017 sebanyak 5248 perkara masih ada sisa 723 perkara.

Tabel 3.6
Sisa Perkara Pengadilan Agama se Wilayah Jambi
Tahun 2017

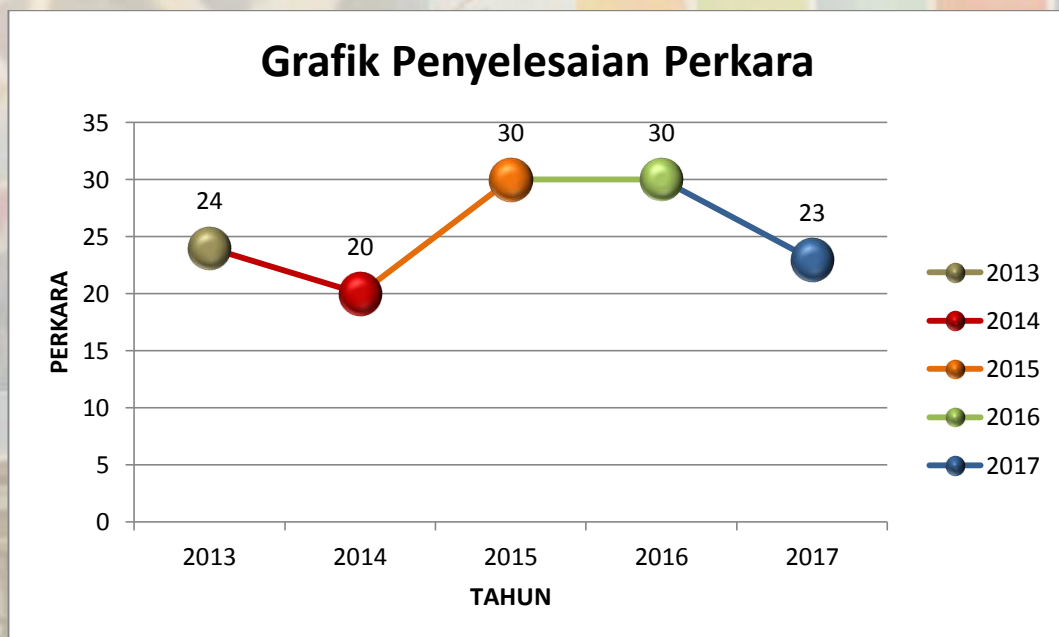
NO	SATKER	SISA TAHUN LALU	PERKARA DITERIMA	PERKARA DIPUTUS	SISA PERKARA TAHUN INI
1	PA Jambi	195	1109	1133	171
2	PA Muara Bulian	18	580	572	26
3	PA Kuala Tungkal	87	725	727	85
4	PA Muara Bungo	40	507	476	71
5	PA Bangko	42	368	375	35
6	PA Sungai Penuh	67	331	303	95
7	PA Muara Sabak	59	431	433	57
8	PA Sarolangun	16	285	271	30
9	PA Sengeti	56	550	540	66
10	PA Muara Tebo	82	423	418	87
	Jumlah	662	5309	5248	723

b. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Pada tahun 2017 perkara yang diputus tepat waktu di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi sebanyak 4497 perkara yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. PTA Jambi | : 23 Perkara |
| 2. PA Jambi | : 828 Perkara |
| 3. PA Muara Bulian | : 503 Perkara |
| 4. Kuala Tungkal | : 578 Perkara |
| 5. PA Muara Bungo | : 400 Perkara |
| 6. PA Bangko | : 679 Perkara |
| 7. PA Sungai Penuh | : 236 Perkara |
| 8. PA Muara Sabak | : 314 Perkara |
| 9. PA Sarolangun | : 223 Perkara |
| 10. PA Sengeti | : 427 Perkara |
| 11. PA Muara Tebo | : 286 Perkara |

Grafik 3.1
Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017



c. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Sepanjang tahun 2017 terdapat 5248 perkara yang putus dimana yang mengajukan banding 24 perkara, kasasi 15 perkara, dan 5 perkara PK. Adapun yang tidak mengajukan perkara banding 5224 perkara, kasasi 5233 perkara dan PK 5243 perkara.

d. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi tahun 2017 pada Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi sebanyak 24 perkara dari 5309 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi.

e. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pidana anak sehingga peradilan agama tidak terdapat perkara diversi.

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai. Demikian halnya kantor, tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan atau administrasi yang sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor.

Agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, maka pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus dilakukan dengan baik.

Dalam mengelola sarana dan prasarana kantor dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan laporan sarana dan prasarana.

Tabel 3.7
Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	NEW COROLLA 1.8 GT	2006	BAIK	-	-	BH 5 MA
2	EVEREST	2013	BAIK	-	-	BH 1911 AZ
3	VIOS	2008	BAIK	-	-	BH 13
4	COROLLA ALTIS 1.8	2008	BAIK	RUSAK RINGAN	-	BH 50 MA
5	KIJANG INNOVA G	2011	BAIK	-	-	BH 1963 AZ
6	KIJANG INNOVA E	2009	BAIK	-	-	BH 1689 AZ
7	APV D	2004		-	RUSAK BERAT	BH 161
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	MEGA PRO GLP III	2005	-	RUSAK RINGAN	-	BH 4434 AZ
2	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 4988 AZ
3	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 4989 AZ
4	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 4990 AZ
5	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 4991 AZ
6	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 4992 AZ
7	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 4993 AZ
8	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 4995 AZ
9	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 4996 AZ
10	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 4997 AZ
11	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 4998 AZ
12	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 5002 AZ
13	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 5003 AZ
14	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 5006 AZ
15	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 5007 AZ
16	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 5008 AZ
17	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 5011 AZ
18	NF 125 SF (FGM-FI)	2007	BAIK	-	-	BH 5012 AZ

Tabel 3.8
Kendaraan Dinas Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	SATUAN KERJA	JENIS MODEL	TAHUN		ASAL PEROLEHAN	PENGGUNA PENANGGUNG JAWAB	KONDISI (B/RR/RB)	KET
			RAKIT	PEROLEH				
1	PA JAMBI	New Rush	2015	2015	Pinjam Pakai	Ketua	Baik	4
		New Avanza	2011	2012	Pembelian	Wakil Ketua	Baik	

		Toyota Vios	2006	2007	MA.RI	Panitera	Baik	
		New Avanza	2011	2012	Pembelian	Sekretaris	Baik	
2	PA SENGETI	Kijang Innova	2014	2014	Pinjam Pakai	Ketua	Baik	4
		Kijang Kapsul	2001	2015	PTA Jambi	Wakil Ketua	RR	
		Kijang Innova	2007	2007	MA.RI	Panitera	RR	
		Suzuki APV	2004	2004	Pembelian	Sekretaris	RR	
3	PA MUARA	Kijang Innova	2013	2013	Hibah Pem	Ketua	Baik	3
	BULIAN	Kijang Innova	2006	2007	MA.RI	Wakil Ketua	RR	
		Suzuki ERTIGA	2012	2012	Pembelian	Panitera	Baik	
4	PA MUARA	Kijang Innova	2005	2005	MA.RI	Ketua	Baik	3
	SABAK	Kijang Innova	2008	2008	MA.RI	Wakil Ketua	Baik	
		New Avanza	2012	2012	Pembelian	Panitera	Baik	
5	PA KUALA	Pajero Sport	2010	2010	Pinjam Pakai	Ketua	Baik	3
	TUNGKAL	Kijang Innova	2006	2007	MA.RI	Wakil Ketua	Baik	
		Suzuki APV	2004	2004	Pembelian	Wakil Ketua	Baik	
6	PA	Toyota Rush	2015	2015	Pinjam Pakai	Ketua	Baik	3
	SAROLANGUN	Suzuki ERTIGA	2012	2012	Pembelian	Wakil Ketua	Baik	
		Kijang Innova	2005	2006	MA.RI	Sekretaris	RR	
7	PA MUARA	Kijang Innova	2006	2007	MA.RI	Ketua	Baik	3
	TEBO	Suzuki APV	2004	2004	Pembelian	Panitera	RR	
		Kijang Innova	2017	2017	Pemkab		Baik	
8	PA MUARA	Kijang Innova	2007	2007	MA.RI	Ketua	Baik	2
	BUNGO	Suzuki ERTIGA	2012	2012	Pembelian	Panitera	Baik	
9	PA BANGKO	Kijang Innova	2014	2014	Hibah Pem	Ketua	Baik	4
		Suzuki APV	2004	2004	Pembelian	Wakil Ketua	Baik	
		New Avanza	2012	2012	Pembelian	Panitera	Baik	
		Kijang Innova	2005	2005	MA.RI	Sekretaris	RR	
10	PA SUNGAI	Suzuki ERTIGA	2012	2012	Pembelian	Ketua	Baik	3
	PENUH	New Avanza	2011	2013	Pembelian	Panitera	Baik	
		Kijang Innova	2014	2014	MA.RI	Umum Keu	RB	

Tabel 3.9
Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Rumah Dinas Ketua	1	BAIK	-	-	-
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	BAIK	-	-	-
3	Rumah Dinas Hakim	2	-	RUSAK RINGAN	-	-
4	Rumah Dinas Panitera	1	BAIK	-	-	-
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	BAIK	-	-	-

Tabel 3.10
Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	5	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang	1	Baik
7	Ruang Aula Utama	2	Baik
8	Ruang Tamu	2	Baik
9	Ruang Perpustakaan	1	Baik
10	Ruang Panmud Banding	1	Baik
11	Ruang Panmud Hukum	1	Baik
12	Ruang Panitera Pengganti	2	Baik
13	Ruang Kabag Umum dan Keuangan	1	Baik
14	Ruang Kasubbag TU & RT	1	Baik
15	Ruang Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	1	Baik
16	Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	1	Baik
17	Ruang Kasubbag Perenprog dan Anggaran	1	Baik
18	Ruang Kasubbag Kepegawaian dan TI	1	Baik
19	Ruang Pentry	1	
20	Lemari Penyimpanan	1	Baik
21	Mesin Ketik Manual (14-16)	1	Rusak Ringan
22	Mesin Foto Copy Folio	1	Baik
23	Lemari Kayu	67	Baik
24	Rak Kayu	1	Baik
25	Filling Cabinet Besi	33	Baik

26	Brandkas	2	Baik
27	Locker	1	Baik
28	Tabung Pemadam Api	2	Baik
29	CCTV	1	Baik
30	Papan Visual / Papan Nama	3	Baik
31	White Board	2	Baik
32	Mesin Absensi	1	Baik
33	Penangkal Petir	1	Baik
34	Lampu lampu Kristal	1	Baik
35	Infocus	2	Baik
36	Meja Kerja Kayu	75	Baik
37	Kursi Besi / Metal	285	Baik
		33	Rusak Ringan
38	Kursi Kayu	1	Rusak Berat
		36	Baik
39	Sice	5	Rusak Ringan
		12	Baik
40	Meja Rapat	1	Rusak
		46	Baik
41	Meja Komputer	28	Baik
		2	Rusak Ringan
42	Tempat Tidur Kayu	2	Baik
43	Kasur	1	Baik
44	Meja Makan Kayu	3	Baik
45	Meja Resepsionis	2	Baik
46	Jam Mekanis	22	Baik
47	Jam Elektronik	6	Baik
48	Mesin Penghisap debu	1	Baik
49	Lemari Es	5	Baik
50	A.C Split	38	Baik
51	Kipas Angin	1	Baik
		6	Rusak Berat
52	Kompor Gas	4	Baik
53	Kompor Minyak	1	Baik
54	Rice Cooker	1	Baik
55	Tabung Gas	3	Baik
56	Rak Piring Aluminium	1	Rusak Berat
57	Televisi	9	Baik
58	Tape Rorder	1	Baik
59	Loudspeaker	28	Baik
60	Microphone	15	Baik
61	Microphone Table Stand	1	Baik
62	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik
63	Tiang Bendera	2	Baik

64	Kaca Hias	2	Rusak Berat
65	Dispenser	4	Baik
66	Mimbar / Podium	2	Baik
67	Palu Sidang	1	Baik
68	Handycam	1	Rusak Berat
69	Karpet	7	Baik
70	Vertikal	25	Baik
71	Kabel Roll	3	Baik
72	Asbak Tinggi	2	Baik
73	DVD Player	2	Baik
74	Kabel	6	Baik
75	UPS	18	Baik
76	Power Amplifier	2	Baik
77	Digital LED Runing	1	Baik
78	Analog	5	Baik
79	Peralatan Studio	1	Baik
80	Rak Peralatan	1	Baik
81	Stabilizing	1	Baik
82	Lighting Stand	2	Baik
83	P.C Unit	16 15	Baik Rusak Berat
84	Laptop	13 2	Baik Rusak Berat
85	Printer	25 7	Baik Rusak Berat
86	Scanner	2	Baik
87	Server	2	Baik
88	Router	2	Baik
89	Monografi	415	Baik
90	Software	4	Baik
91	Bahan Perpustakaan	18	Baik

D. Pengelolaan Keuangan

Keuangan Negara sebagai kegiatan di suatu instansi pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana (sources of found) dan kemudian bagaimana dana tersebut digunakan (uses of found) untuk mencapai tujuan nasional, dewasa ini dituntut dan dikaitkan dengan akuntabilitas yang kemudian disebut dengan akuntabilitas keuangan Negara untuk mewujudkan good governance. Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut membutuhkan komitmen, integritas dan kompetensi dalam penataan keuangan Negara khususnya.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran.

Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Di lingkungan Mahkamah Agung, pengelolaan keuangan Negara didasarkan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebagai acuan dan gambaran berapa jumlah anggaran yang harus dibelanjakan dan berapa jumlah pendapatan yang ditargetkan dalam setahun. Pengelolaan DIPA di lingkungan Mahkamah Agung khususnya dibagi dalam 2 kategori yaitu DIPA Non Teknis (Umum) dan DIPA Teknis (Fungsional).

DIPA non teknis atau umum diperuntukkan bagi kebutuhan pokok satuan kerja seperti belanja rutin pegawai, belanja barang operasional dan non operasional serta belanja modal yang berada dibawah tata kelola eselon I Badan Urusan Administrasi (01). Sedangkan DIPA teknis atau fungsional diperuntukkan untuk pembiayaan satuan kerja dalam penyelesaian perkara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan serta untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan. DIPA teknis ini berada dibawah tata kelola eselon Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04).

a. Pengelolaan DIPA Non Teknis (Badan Urusan Administrasi)

Pengelolaan DIPA Non Teknis pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja operasional perkantoran dan belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana. Pengelolaan DIPA non teknis ini terdiri dari beberapa program dan kegiatan utama yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk alokasi anggaran DIPA non teknis dari Badan Urusan Administrasi (01) yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta seluruh satuan kerja dibawahnya pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Total Pagu	:	Rp. 55.724.740.000,-
Realisasi Anggaran 2017	:	Rp. 53.608.518.671,-
Sisa	:	Rp. 2.116.221.329,-

Persentase penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mencapai 96,2 % dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2017. Adapun rincian per satuan kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Pengadilan Agama se Wilayah Jambi Tahun 2017

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	13,511,093,000	13,331,430,766	179,662,234	98.67%
2	Pengadilan Agama Jambi	10,207,310,000	10,160,698,355	46,611,645	99.54%
3	Pengadilan Agama Sengeti	5,228,383,000	4,371,007,107	857,375,893	83.60%
4	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	3,541,421,000	3,432,134,121	109,286,879	96.91%
5	Pengadilan Agama Muara Sabak	3,089,877,000	2,957,535,767	132,341,233	95.72%
6	Pengadilan Agama Muara Bulian	4,955,985,000	4,896,888,527	59,096,473	98.81%
7	Pengadilan Agama Muara Tebo	2,556,306,000	2,394,855,773	161,450,227	93.68%

8	Pengadilan Agama Muara Bungo	3,052,128,000	3,017,085,133	35,042,867	98.85%
9	Pengadilan Agama Sarolangun	2,611,029,000	2,380,936,298	230,092,702	91.19%
10	Pengadilan Agama Bangko	3,165,392,000	2,942,742,776	222,649,224	92.97%
11	Pengadilan Agama Sungai Penuh	3,805,816,000	3,723,204,048	82,611,952	97.83%
	Jumlah	55,724,740,000	53,608,518,671	2,116,221,329	96.20%

Alokasi anggaran alokasi DIPA non teknis untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya pada tahun anggaran 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Penurunan alokasi pada Belanja Pegawai disebabkan dalam 3 tahun ini berkurangnya jumlah hakim di wilayah Provinsi Jambi sedangkan yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi sangat sedikit.
2. Pengalokasian belanja pegawai untuk Uang Lembur pada tahun 2017 yang tidak dialokasikan pada tahun anggaran sebelumnya karena kebijakan Mahkamah Agung.
3. Penurunan pada anggaran belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikarenakan penurun anggaran untuk belanja modal Mahkamah Agung.

Adapun perbandingan anggaran serta realisasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun anggaran 2017, 2016 dan 2015 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi

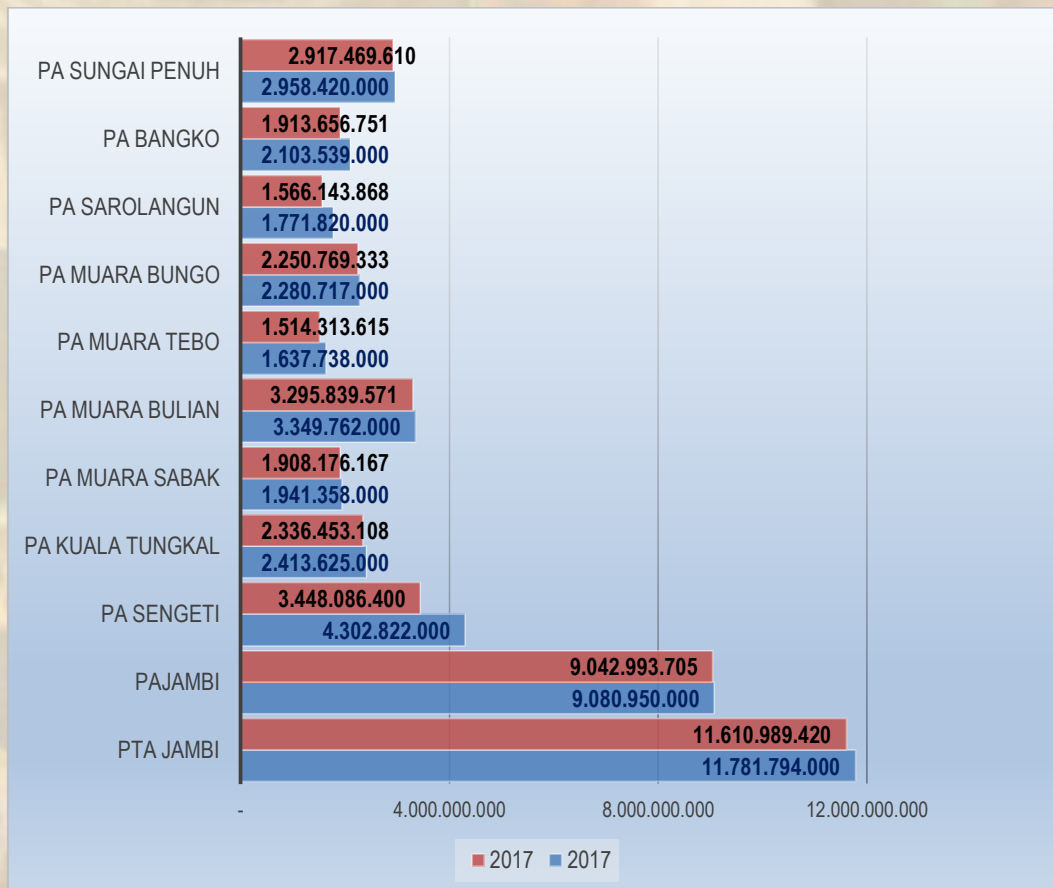
SATKER	2017			2016			2015		
PTA Jambi	13,511,093,000	13,331,430,766	99	17,002,550,000	16,922,396,469	100	17,036,821,000	17,005,656,911	100
PA Jambi	10,207,310,000	10,160,698,355	100	9,926,073,000	9,761,027,658	98	9,873,382,000	9,757,536,144	99
PA Sengeti	5,228,383,000	4,371,007,107	84	4,520,219,000	4,262,952,711	94	4,053,593,000	4,044,087,042	100
PA Kuala Tungkal	3,541,421,000	3,432,134,121	97	3,582,726,000	3,337,687,676	93	3,132,215,000	3,047,489,746	97
PA Muara Sabak	3,089,877,000	2,957,535,767	96	3,441,567,000	3,337,426,835	97	3,153,413,000	3,127,020,656	99

PA Muara Bulian	4,955,985,000	4,896,888,527	99	4,263,810,000	4,148,084,200	97	2,990,623,000	2,958,687,217	99
PA Muara Tebo	2,556,306,000	2,394,855,773	94	3,322,232,000	3,119,304,104	94	2,743,648,000	2,729,251,188	99
PA Muara Bungo	3,052,128,000	3,017,085,133	99	3,112,235,000	2,981,800,824	96	2,708,885,000	2,705,860,102	100
PA Sarolangun	2,611,029,000	2,380,936,298	91	3,415,334,000	2,947,754,365	86	2,760,178,000	2,645,848,318	96
PA Bangko	3,165,392,000	2,942,742,776	93	4,468,435,000	3,598,448,045	81	3,432,262,000	3,397,909,640	99
PA Sungai Penuh	3,805,816,000	3,723,204,048	98	4,050,395,000	3,731,816,667	92	3,896,756,000	3,880,000,862	100

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, anggaran belanja pegawai berjumlah Rp. 43.622.545.000,- (empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu). Jumlah ini menurun 13,6 % dari tahun 2016 yang berjumlah Rp. 50,501,477,000,- (lima puluh juta milyar lima ratus satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Berikut grafik alokasi pagu anggaran dan realisasi untuk Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Grafik 3.2
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan
Pengadilan Agama se Wilayah Jambi
Tahun 2017



Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa penurunan anggaran terjadi karena hal sebagai berikut:

1. Penurunan alokasi pada Belanja Pegawai disebabkan dalam 3 tahun ini berkurangnya jumlah hakim di wilayah Provinsi Jambi sedangkan yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi sangat sedikit.
2. Pengalokasian belanja pegawai untuk Uang Lembur pada tahun 2017 yang tidak dialokasikan pada tahun anggaran sebelumnya karena kebijakan Mahkamah Agung untuk tidak mengalokasikan mengingat kondisi jumlah anggaran yang menurun.

Dari anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2017, realisasi penyerapan anggaran belanja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan

Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mampu menyerap anggaran sebesar 96 % dengan nilai sebagai berikut:

Total Pagu 2017	:	Rp. 43.622.545.000,-
Realisasi Tahun 2017	:	Rp. 41.804.891.548,-
Sisa	:	Rp. 1.817.653.452,-

Nilai ini secara persentase meningkat namun dilihat dari nominalnya menurun dibandingkan dengan penyerapan tahun anggaran 2016 dengan nilai sebagai berikut:

Total Pagu 2016	:	Rp. 50.501.477.000,-
Realisasi Tahun 2016	:	Rp. 47.733.925.474,-
Sisa	:	Rp. 2.767.551.526,-
Total Pagu 2015	:	Rp. 48.475.665.000,-
Realisasi Tahun 2015	:	Rp. 48.076.837.244,-
Sisa	:	Rp. 2.767.551.526,-

Kondisi ini dikarenakan penurunan pada jumlah pegawai terutama Hakim Tk Banding dan Hakim Tk. Pertama yang menyebabkan penurunan penyerapan belanja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambidan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi.

Rincian pagu dan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.13
Rincian Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai Per Satuan Kerja

SATKER	2017			2016			2015		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PTA Jambi	11,781,794,000	11,610,989,420	99	15,447,056,000	15,366,981,121	99	15,313,603,000	15,283,503,353	100
PA Jambi	9,080,950,000	9,042,993,705	100	9,129,879,000	8,965,532,058	98	9,191,422,000	9,082,858,194	99
PA Sengeti	4,302,822,000	3,448,086,400	80	3,707,203,000	3,453,185,714	93	3,567,110,000	3,566,216,042	100

PA Kuala Tungkal	2,413,625,000	2,336,453,108	97	2,903,456,000	2,664,730,710	92	2,623,480,000	2,559,939,679	98
PA Muara Sabak	1,941,358,000	1,908,176,167	98	2,596,600,000	2,504,441,967	96	2,753,551,000	2,731,465,106	99
PA Muara Bulian	3,349,762,000	3,295,839,571	98	3,205,409,000	3,101,447,950	97	2,473,826,000	2,445,848,841	99
PA Muara Tebo	1,637,738,000	1,514,313,615	92	2,402,165,000	2,210,451,491	92	2,363,854,000	2,358,671,616	100
PA Muara Bungo	2,280,717,000	2,250,769,333	99	2,339,805,000	2,233,321,962	95	2,106,591,000	2,106,312,002	100
PA Sarolangun	1,771,820,000	1,566,143,868	88	2,585,031,000	2,146,334,765	83	2,284,938,000	2,181,189,176	95
PA Bangko	2,103,539,000	1,913,656,751	91	3,071,450,000	2,247,273,369	73	2,820,077,000	2,797,282,373	99
PA Sungai Penuh	2,958,420,000	2,917,469,610	99	3,113,423,000	2,840,224,367	91	2,977,213,000	2,963,550,862	100
Jumlah	43,622,545,000	41,804,891,548	96	50,501,477,000	47,733,925,474	95	48,475,665,000	48,076,837,244	99

Belanja Barang

Belanja Barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, anggaran belanja barang berjumlah Rp. 8.596.805.000,- (Delapan milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah). Jumlah ini meningkat 20 % dari tahun 2016 yang berjumlah Rp. 6,864,917,000,- (Enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah). Kenaikan yang cukup signifikan ini dikarenakan sebagai berikut:

1. Peningkatan anggaran belanja barang yang disesuaikan dengan peningkatan harga Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2017
2. Peningkatan anggaran untuk belanja honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
3. Pengalokasian belanja operasional lainnya berupa pengadaan pakaian dinas pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

4. Peningkatan anggaran belanja daya dan jasa khususnya listrik dikarenakan adanya kenaikan tarif dasar listrik.

Berikut grafik alokasi pagu anggaran dan realisasi untuk Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Grafik 3.3
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama dan
Pengadilan Agama se Wilayah Jambi
Tahun 2017



Dari anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2017, realisasi penyerapan anggaran belanja barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mampu menyerap anggaran sebesar 97 % dengan nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Barang 2017 : Rp. 8,596,805,000,-
 Realisasi Tahun 2017 : Rp. 8,304,087,745,-
 Sisa Anggaran : Rp. 292.717.255,-

Nilai ini secara persentase sama dengan capaian realisasi pada tahun 2016 dengan persentase realisasi penyerapan tahun anggaran 2016 dan 2015 sebesar 98,48% dan 98,07% dengan nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Barang 2016 : Rp. 6.864.917.000,-
 Realisasi Tahun 2016 : Rp. 6.680.732.721,-
 Sisa Anggaran : Rp. 184.184.279,-
 Pagu Belanja Barang 2015 : Rp. 5.108.998.000,-
 Realisasi Tahun 2015 : Rp. 5.031.503.082,-
 Sisa Anggaran : Rp. 77.494.918,-

Rincian pagu dan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.14
Rincian Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Barang Per Satuan Kerja

SATKER	2017			2016			2015		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PTA Jambi	1,558,299,000	1,549,481,346	99	1,369,494,000	1,369,430,348	100	1,293,605,000	1,293,360,058	100
PA Jambi	889,360,000	880,994,650	99	680,985,000	636,889,676	94	447,960,000	441,077,950	98
PA Sengeti	750,061,000	747,672,707	100	577,516,000	574,381,997	99	396,483,000	387,971,000	98
PA Kuala Tungkal	784,296,000	752,181,013	96	605,430,000	581,678,153	96	468,735,000	447,550,067	95
PA Muara Sabak	638,019,000	538,859,600	84	530,972,000	486,842,300	92	359,862,000	355,555,550	99
PA Muara Bulian	664,783,000	663,653,956	100	485,945,000	475,152,613	98	329,297,000	325,338,376	99
PA Muara Tebo	603,568,000	565,556,658	94	461,270,000	455,069,966	99	339,794,000	330,579,572	97
PA Muara Bungo	636,411,000	631,430,300	99	494,194,000	493,606,800	100	296,294,000	295,205,100	100
PA Sarolangun	648,209,000	623,892,430	96	540,841,000	529,569,500	98	385,240,000	375,895,142	98

PA Bangko	756,353,000	723,794,185	96	593,967,000	582,151,868	98	412,185,000	401,660,267	97
PA Sungai Penuh	667,446,000	626,570,900	94	524,303,000	495,959,500	95	379,543,000	377,310,000	99
Jumlah	8,596,805,000	8,304,087,745	97	6,864,917,000	6,680,732,721	97	5,108,998,000	5,031,503,082	98

Belanja Modal

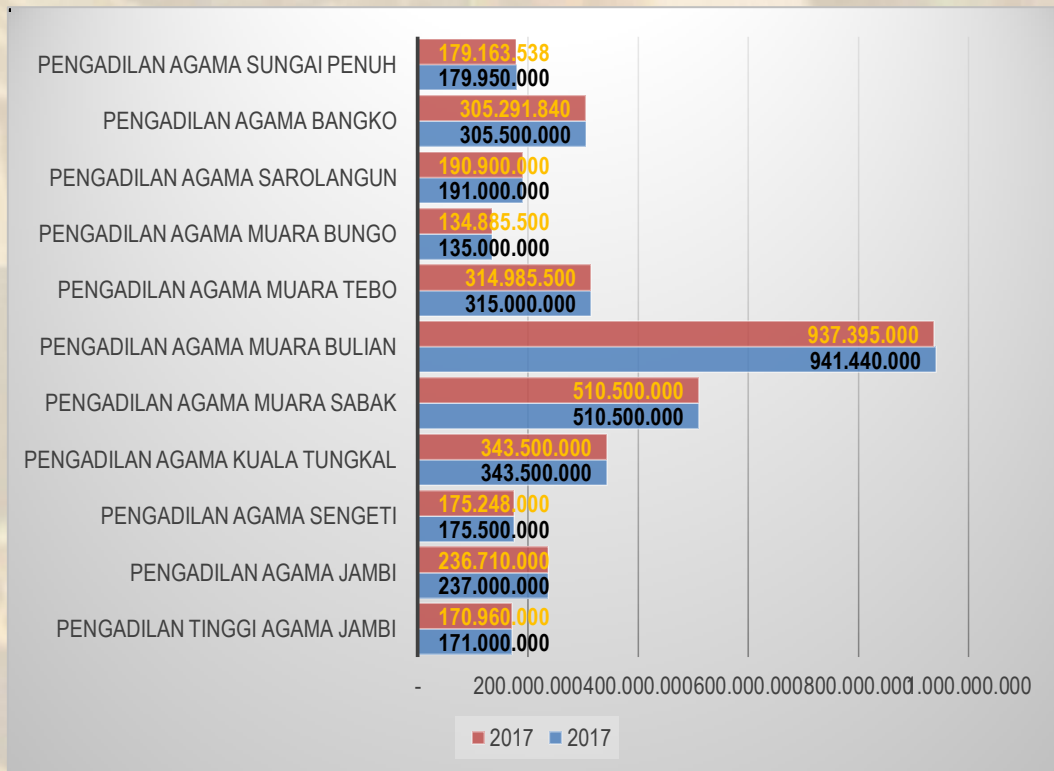
Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, anggaran belanja modal tahun 2017 berjumlah Rp. 3,505,390,000,- (Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah). Jumlah ini menurun 6% dari tahun 2016 yang berjumlah Rp. 3,739,182,000,- (Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta serratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Kegiatan belanja modal pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi bertujuan untuk:

1. Peningkatan anggaran belanja modal yang difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pengadilan terutama untuk pelayanan publik.
2. Pengalokasian anggaran dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung RI.

Berikut grafik alokasi pagu anggaran dan realisasi untuk Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Grafik 3.4
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama dan
Pengadilan Agama se Wilayah Jambi
Tahun 2017



Dari anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2017, realisasi penyerapan anggaran belanja modal Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mampu menyerap anggaran sebesar 99% dengan nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Modal 2017	:	Rp.	3,505,390,000,-
Realisasi Tahun 2017	:	Rp.	3,499,539,378,-
Sisa	:	Rp.	5.850.622,-

Nilai ini sama dengan persentase realisasi penyerapan tahun anggaran 2016 dan 2015 sebesar 99% dengan rincian nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Modal 2016	:	Rp.	3.734.041.359,-
Realisasi Tahun 2016	:	Rp.	3.734.041.359,-
Sisa	:	Rp.	5.140.641,-

Pagu Belanja Modal 2015 : Rp. 2.197.113.000,-
 Realisasi Tahun 2015 : Rp. 2.191.007.500,-
 Sisa : Rp. 6.105.500,-

Rincian pagu dan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.15
Rincian Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Modal Per Satuan Kerja

SATKER	2017			2016			2015		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PTA Jambi	171,000,000	170,960,000	100	517,560,000	517,066,750	100	429,613,000	428,793,500	100
PA Jambi	237,000,000	236,710,000	100	434,122,000	433,700,000	100	234,000,000	233,600,000	100
PA Sengeti	175,500,000	175,248,000	100	302,000,000	301,888,800	100	90,000,000	89,900,000	100
PA Kuala Tungkal	343,500,000	343,500,000	100	306,000,000	305,460,100	100	40,000,000	40,000,000	100
PA Muara Sabak	510,500,000	510,500,000	100	218,000,000	217,887,000	100	40,000,000	40,000,000	100
PA Muara Bulian	941,440,000	937,395,000	100	716,000,000	714,285,000	100	187,500,000	187,500,000	100
PA Muara Tebo	315,000,000	314,985,500	100	235,500,000	235,385,000	100	40,000,000	40,000,000	100
PA Muara Bungo	135,000,000	134,885,500	100	251,000,000	250,833,000	100	306,000,000	304,343,000	99
PA Sarolangun	191,000,000	190,900,000	100	406,000,000	404,750,000	100	90,000,000	88,764,000	99
PA Bangko	305,500,000	305,291,840	100	167,000,000	166,800,709	100	200,000,000	198,967,000	99
PA Sungai Penuh	179,950,000	179,163,538	100	186,000,000	185,985,000	100	540,000,000	539,140,000	100
Jumlah	3,505,390,000	3,499,539,378	100	3,739,182,000	3,734,041,359	100	2,197,113,000	2,191,007,500	100

b. Pengelolaan DIPA Badan Urusan Administrasi (04)

Dalam rangka pengelolaan keuangan yang baik, maka Mahkamah Agung RI mengambil kebijakan pemisahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan yaitu dalam proses penyelesaian perkara. Untuk Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, DIPA tersebut

dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

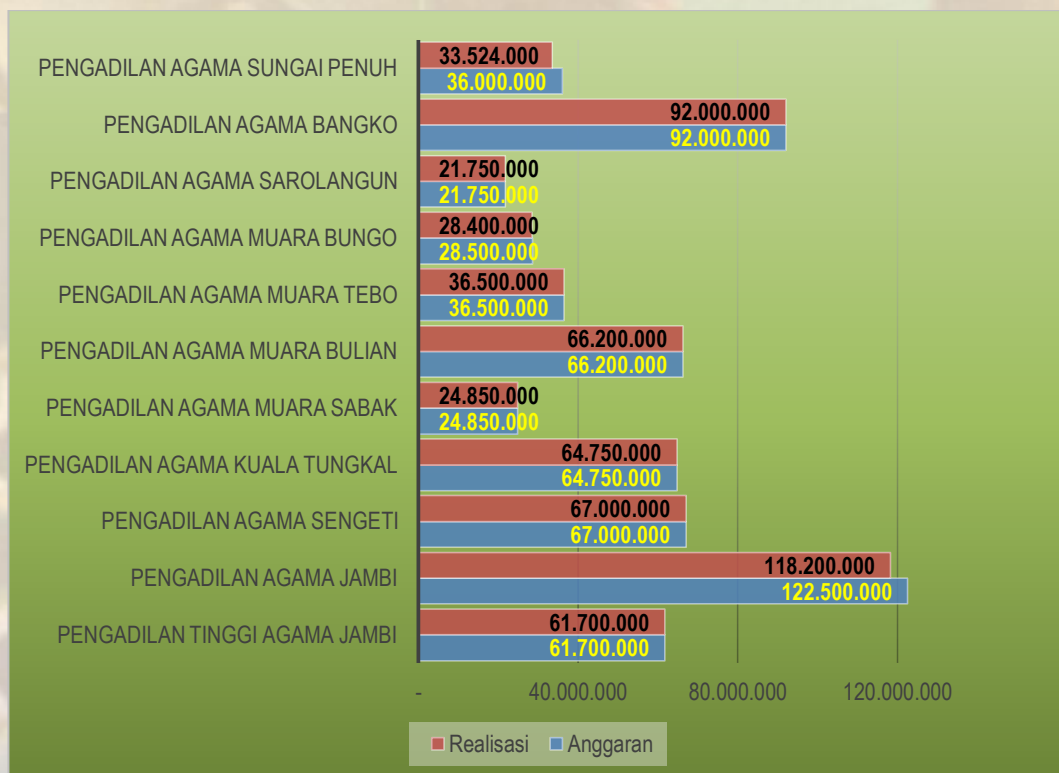
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Pengadilan Tk Banding ke Pengadilan Tk Pertama dalam rangka peningkatan manajemen Peradilan Agama.
2. Kegiatan asistensi dan assessment akreditasi penjamin mutu peradilan agama di lingkungan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk terciptanya pelayanan prima terhadap para pencari keadilan.
3. Pengalokasian dana untuk pihak berperkara yang tidak mampu secara ekonomi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan melalui program Perkara Prodeo
4. Pengalokasian dana untuk sidang di luar gedung pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dimana penyelenggaraan sidang dilakukan di tempat yang jarak tempuhnya sulit dijangkau masyarakat melaui program Sidang Keliling. Selain itu, siding di luar gedung juga digunakan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang belum tercatat pernikahannya melalui program terpadu pelaksanaan Itsbat Nikah.
5. Pengalokasian dana untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu melalui program POSBAKUM.
6. Pengalokasian dana untun perjalanan dinas bagian Kepaniteraan dalam rangka konsultasi ke Pengadilan Tk Banding.
7. Pengalokasian dana untuk Koordinator Wilayah Pengelola DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama.

Alokasi anggaran DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama (04) yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta seluruh satuan kerja dibawahnya pada tahun 2017 ini yaitu sebagai berikut:

Total Pagu 2017	:	Rp.	621,750,000,-
Realisasi anggaran 2017	:	Rp.	614,874,000,-
Sisa	:	Rp.	6.876.000,-

Berikut grafik alokasi pagu anggaran dan realisasi untuk Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Grafik 3.5
Pagu dan Realisasi Belanja DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama dan
Pengadilan Agama se Wilayah Jambi
Tahun 2017



Alokasi anggaran alokasi DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama (04) untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya pada tahun anggaran 2017 mengalami penurunan tetapi tidak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pemangkasan anggaran dari Pemerintah dengan tujuan efisiensi anggaran. Adapun perbandingan anggaran serta realisasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun anggaran 2017, 2016 dan 2015 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.16
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2017, 2016, 2015
Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

SATKER	2017			2016			2015		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pengadilan Tinggi Agama Jambi	61,700,000	61,700,000	100	58,100,000	58,100,000	100	200,431,000	199,754,300	100
Pengadilan Agama Jambi	122,500,000	118,200,000	96	154,100,000	153,410,000	100	67,280,000	67,139,000	100
Pengadilan Agama Sengeti	67,000,000	67,000,000	100	68,500,000	68,440,000	100	27,590,000	26,800,000	97
Pengadilan Agama Kuala Tungkal	64,750,000	64,750,000	100	79,750,000	79,357,000	100	54,870,000	53,875,000	98
Pengadilan Agama Muara Sabak	24,850,000	24,850,000	100	27,400,000	27,100,000	99	26,735,000	26,735,000	100
Pengadilan Agama Muara Bulian	66,200,000	66,200,000	100	70,700,000	70,525,000	100	31,305,000	31,110,000	99
Pengadilan Agama Muara Tebo	36,500,000	36,500,000	100	38,000,000	37,776,000	99	26,045,000	26,045,000	100
Pengadilan Agama Muara Bungo	28,500,000	28,400,000	100	30,000,000	28,580,000	95	23,945,000	23,275,000	97
Pengadilan Agama Sarolangun	21,750,000	21,750,000	100	24,300,000	24,300,000	100	23,105,000	22,220,000	96
Pengadilan Agama Bangko	92,000,000	92,000,000	100	107,000,000	107,000,000	100	68,235,000	68,095,000	100
Pengadilan Agama Sungai Penuh	36,000,000	33,524,000	93	37,500,000	37,005,000	99	36,445,000	35,600,000	98
Jumlah	621,750,000	614,874,000	99	695,350,000	691,593,000	99	585,986,000	580,648,300	99

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut program keterbukaan informasi pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan Teknologi Informasi sudah melangkah ke modernisasi dan sudah berjalan dengan pesat. Di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi penerapannya pun sudah cukup baik. SDM yang dimiliki juga berabgsung-angsur mulai memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Keadaan ini tentunya cukup mendukung penyelesaian perkara namun belum begitu maksimal.

Dalam mengelola teknologi informasi terkait SIPP Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi saat ini telah memiliki perangkat keras (hardware) berupa server, laptop, PC, Printer yang sudah terstandar oleh ketentuan Mahkamah Agung RI. Dan perangkat lunak (software) berupa sistem operasi linux centos 7.

Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi telah menggunakan SIPP versi 3.2.0 yang mana aplikasi SIPP versi 3.2.0 telah terintegrasi ke dalam direktori putusan dan adanya menu delegasi (tabayun online).

- **Publikasi Perkara (One Day One Publish)]**

One Day Publish merupakan maklumat pelayanan kepada publik, dimana mulai dari pendaftaran perkara, pembuatan berita acara hingga putusan telah menggunakan aplikasi SIPP versi 3.2.0. yang telah terintegrasi ke dalam direktori putusan. Yang mana Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi telah melaksanakannya.

F. Regulasi Tahun 2017

1. Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/186/PS/IV/2017 Tanggal 10 April 2017 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah serta Sekretaris Hatibinwasda Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/1008/PS/VIII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/133/KP.04.6/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Tim Promosi dan Mutasi Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/975/KP.04.6/VIII/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

5. Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/ 1322 /KP.04.6/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 tentang Pelaksana Tugas Panitera Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017;
6. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W5-A/149/KU.00/I/2017 Tanggal 5 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2017;
7. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W5-A/144/KU.00/I/2017 Tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengisi Surat Perintah Membayar (SPM), dan Staf Pengelola Anggaran Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/1473/PS/12/2017 Tanggal 21 Desember 2017 tentang Pembagian Wilayah Pembinaan dan Pengawasan Pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/952.a/HK.05/VIII/2017 Tanggal 4 Agustus 2017 Tentang Susunan Majelis Hakim dan Daftar Urut Senioritas Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/185/HM/I/2017 Tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Jambi 2017
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/184/HM.02.3/I/2017 Tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi 2017
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/140/HK.05/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Petugas Kelompok Meja I , II , dan III Pengadilan Tinggi Agama Jambi
13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/142/HK.05/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/136/HK.05/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengambilan Biaya Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
15. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/144/HK.05/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Biaya Proses dan Staf Pelaksana pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
16. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/138/HK.05/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
17. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/141/HK.00.8/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Perincian Pengelolaan Biaya Proses Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
18. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/145/KU.00/I/2017 Tanggal 5 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2017.
19. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/143/HK.05/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses dan Pembuat Komitmen Biaya Proses Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya pengawasan internal diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan internal diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan internal tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan internal juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Berdasarkan keputusan tersebut, pengawasan internal meliputi 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

❖ Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat yaitu sebagai berikut:

“Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi berada pada: Pimpinan, Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Struktural di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Adapun Hakim Tinggi Pengawas Bidang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: W5-A/186/PS/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi pembina dan Pengawas Daerah. Sebagai penanggung jawab hakim tinggi pengawas bidang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Koordinator pelaksanaan teknis dan memimpin dalam pengawasan dan pembinaan serta membuat hasil pembinaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan selanjutnya.

Pengawasan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilakukan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali. Adapun susunan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang
Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017

NO	NAMA	BIDANG
1	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi	Koordinator
2	a. Drs. Abd Rahman Usman, S.H. b. Drs. Mas'ud c. Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.	Kepaniteraan Banding dan Hukum
3	a. Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H b. Drs. H. Masykurin Hamid, S.H.,M.S.I.	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
4	a. Drs. H. Bustamin Hp, S.H.,M.H b. Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
5	a. Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H.,M.H b. Drs. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy. c. Drs. H. Muslim, S.H.,M.H.	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
6	a. Drs. M. Nasir Daud b. Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H.	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Sedangkan untuk susunan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah
Pengadilan Agama se Wilayah Jambi Tahun 2017

NO	NAMA	BIDANG
1	Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.Si. Henry Hanafi, S.H.,M.H Tri Wahyuni, S,Kom.,M.H Vina Amrina Widianingsih W, A.Md Wiwit Rahmadhani, S.E.,M.E.Sy Panca Indriatari	Pengadilan Agama Jambi
2	Drs. M. Nasir Daud Drs. H. Muslim,S.H.,M.H Hartati, S.H..M.H Hj. Mayatu Sofia, S.H.,M.H Muthiya Sari, S.Sos.,M.H Rini Hafsari S, S.E.,M.H	Pengadilan Agama Sengeti
3	Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H Drs. H. Muslim, S.H.,M.H Drs. Zubir Ishak, M.H. Jufri Azhari, S.Sy Enita	Pengadilan Agama Muara Sabak
4	Drs. H. Bustamin Hp, S.H.,M.H. Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H.M.H Drs. Zubir Ishak, M.H Fadli, S.H.,M.H. Imam Nurwanto, S.H.I	Pengadilan Agama Kuala Tungkal
5	Drs. H. Asri Damsy, S.H.,M.H Drs. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy H. Zainal Abidin, S.A.,M.H Sahril, S.H.,M.H Faizal, S.H.,M.H Rovel Rinaldi, S.H.I.,M.H.	Pengadilan Agama Muara Bulian
6	Drs. H. Mas'ud Drs. Bustamin Hp, S.H.,M.H Sahril, S.H.,M.H. Faizal, S.H.,M.H. H. Idris Latif, S.H.,M.H. Yudhistira Adi Pinto, S.E.,M.H Ahmad Ghufuran, S.E.,M.M	Pengadilan Agama Muara Tebo
7	Drs. Moh Syar'i Effendi, S.H. Drs. H. Muslim, S.H.,M.H. Drs. Jumaani Soleh Drs. Aidil Mujahid Abdul Rachman, S.E.	Pengadilan Agama Muara Bungo
8	Drs. H. Abd Hamid Pulungan,S.H.M.H. Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H. Baharuddin Djalil, S.H Hj. Yahidah, S.H.,M.H Hj. Mayatu Sofia, S.H.,M.H M. Ukbah Rizal, S.Kom.	Pengadilan Agama Sarolangun
9	Drs. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy Drs. H. Zaenal Hakim S.H. Drs. Namlis, M.H. Drs. Mawardi, S.H.,M.H.	Pengadilan Agama Bangko

	H. Zaenal Abidin, S.Ag.,M.H Fadli, S.H.,M.H	
10	Drs. Abd Rahman Usman, S.H. Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I Zubir Ishak, M.H Drs. Jumaani Soleh Gusmi Yanti Fitriani, A.Md	Pengadilan Agama Sungai Penuh

❖ Pengawasan Fungsional

Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan adanya Pengawasan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di Lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tingkat wilayah, kewenangan pengawaan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia didelegasikan kepada PengadilanTingkat Banding atau Pengadilan Tinggi Agama, sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 ayat (3)

“Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan”.

Pengawasan fungsional ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Pengawasan dilaksanakan setiap semester. Pada tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Yang Diselenggarakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi ke Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/186/PS/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Materi Pembinaan dan Pengawasan meliputi Administrasi Peradilan, Management Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Eksaminasi terhadap perkara dan Kesekretariatan

Untuk tahun 2017 pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan secara terjadwal sebagai berikut :

Tabel. 4.3
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
Pengadilan Agama se Wilayah Jambi Tahun 2017

NO	TEMPAT	TANGGAL	PETUGAS
1	Pengadilan Agama Jambi	11 s.d. 12 Juli 2017	1. Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. 2. Drs. H. Masykurin Hamid, S.H.,M.S.I 3. Henry Hanafi, S.H.,M.H 4. Vina Amrina 5. Wiwit Rahmadhani, S.E.,M.E.Sy. 6. Widianingsih W, A.Md. 7. Tri Wahyuni, S.Kom.,M.H. 8. Panca Indriatari, A.Md
2	Pengadilan Agama Sengeti	17 s.d. 18 Mei 2017	1. Drs. M. Nasir Daud 2. Drs. H. Muslim, S.H.,M.H 3. Hartati, S.H.,M.H. 4. Muthiya Sari, S.Sos.,M.H 5. Rini Hafsari, S.E.,M.H.
3	Pengadilan Agama Muara Bulian	17 s.d. 18 Mei 2017	1. Drs. H. Asri Damsy, S.H.,M.H. 2. Drs. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy. 3. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H. 4. Sahril, S.H.,M.H. 5. Faizal, S.H.,M.H. 6. Rovel Rinaldi, S.H.I.,M.H.
4	Pengadilan Agama Muara Sabak	12 s.d. 13 Juli 2017	1. Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H. 2. Drs. H. Muslim, S.H.,M.H. 3. Hj. Mayatu Sofia, S.H.,M.H. 4. Drs. Zubir Ishak, M.H. 5. Jufri Azhari, S.Sy. 6. Enita
5	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	17 s.d. 19 Mei 2017	1. Drs. H. Bustamin Hp, S.H.,M.H. 2. Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H.,M.H 3. Drs. Zubir Ishak, M.H. 4. Fadli, S.H.,M.H 5. Imam Nurwanto, S.H.I.
6	Pengadilan Agama Sarolangun	22 s.d. 24 Mei 2017	1. Drs. H. Abd Hamid Pulungan, S.H., M.H. 2. Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H. 3. Baharuddin Jalil, S.H. 4. Hj. Yahidah, S.H.,M.H. 5. Hj. Mayatu Sofia, S.H. 6. M. Ukbah Rizal, S.Kom
7	Pengadilan Agama Muara Tebo	11 s.d. 13 Juli 2017	1. Drs. H. Mas'ud 2. Drs. H. Bustamin Hp, S.H.,M.H. 3. Sahril, S.H.,M.H. 4. Faizal, S.H.,M.H 5. H. Idris Latif, S.H.,M.H. 6. Yudhistira Adi Pinto, S.E.,M.H. 7. Ahmad Ghufuran, S.E.,M.M.

8	Pengadilan Agama Muara Bungo	22 s.d. 24 Mei 2017	1. Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H. 2. Drs. H. Muslim, S.H.,M.H. 3. Drs. Jumaani Soleh 4. Drs. Aidil Mujahid 5. Abdul Rahman, S.E
9	Pengadilan Agama Bangko	22 s.d. 24 Mei 2017	1. Drs. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy 2. Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. 3. Drs. Namlis, M.H. 4. Mawardi, S.H.,M.H. 5. H. Zainal Abidin, S.Ag.,M.H. 6. Fadli, S.H.,M.H.
10	Pengadilan Agama Sungai Penuh	25 s.d. 28 Juli 2017	1. Drs. Abd. Rahman Usman, S.H. 2. Drs. H. Masykurin Hamid, S.H.,M.S.I. 3. Drs. Zubir Ishak, M.H. 4. Drs. Jumaani Soleh 5. Gusmi Yanti Fitriani, A.Md.

Dalam pelaksanaannya, apabila tim pembinaan dan pengawasan tersebut menemukan kesalahan-kesalahan maka diadakan kontrak kerja terhadap Pengadilan Agama tersebut serta dievaluasi sesuai dengan tanggal berakhirnya masa kontrak kerja tersebut oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

B. Evaluasi

Untuk melihat hasil dari kinerja apakah meningkat atau menurun maka dilaksanakan evaluasi. Evaluasi merupakan tolak ukur dari kinerja setiap instansi atau lembaga pemerintahan yang akan menentukan hasil yang telah dicapai atau yang akan dicapai.

Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi kinerja kegiatan setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Selanjutnya sesuai dengan atribut indikator kinerja dan capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, evaluasi kinerja kegiatan dilakukan. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya.

Program dan kegiatan yang dievaluasi seharusnya merupakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis instansi yang

bersangkutan. Bagi instansi pemerintah yang bersangkutan evaluasi yang dilakukan harus merujuk kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik itu Input, Proses, Output, Outcome, Benefit dan Impactnya, dan pula Capaiannya.

Evaluasi Program adalah suatu cara yang membawa kepada keputusan publik dengan didasarkan kepada adanya pengetahuan mengenai masalah, keefektifan dari strategi sebelumnya dalam mengurangi permasalahan, dan observasi terhadap keefektifan program tertentu. Selain itu evaluasi program dapat diartikan sebagai suatu penilaian terhadap output program dan penilaian terhadap program yang diinginkan/tujuan. Evaluasi program atau penelitian evaluasi antara lain bertujuan untuk:

1. Perbaikan Program
2. Mendukung program yang sedang berjalan
3. Menyelidiki/mengaudit program untuk mencari dimana letak terjadinya kesalahan jika program gagal
4. Menghapuskan program jika program justru berdampak negative

Dikantor Pengadilan Tinggi Agama Jambi evaluasi dilaksanakan melalui Rapat koordinasi, pengawasan dan pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Rapat Koordinasi dilaksanakan untuk memonitor sekaligus mengevaluasi pencapaian program-program yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan perbulan, pertriwulan, persemester dan setiap akhir tahun. Dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan tenaga kontrak kurun waktu tahun 2017 telah dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja masing-masing pegawai dan tenaga honorer dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melaksanakan rapat bulanan bidang kepaniteraan/kesekretariatan setiap minggu ke empat setiap bulan.
2. Melaksanakan rapat bulanan seluruh pegawai dan tenaga honorer minggu pertama setiap bulan.
3. Melaksanakan DDTK secara insedentil.
4. Memberikan reward dan punishment kepada pegawai dan tenaga honorer.
5. Memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai dalam bentuk DP3 pada akhir tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan menganalisa tugas-tugas dan pencapaian Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah berupaya maksimal melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan program kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016, meskipun masih dapat beberapa hambatan.
2. Penggunaan anggaran yang tersedia di dalam DIPA 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jambi, baik untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan telah dikelola sesuai dengan tata kelola dan aturan yang berlaku.
4. Sisa Perkara Tahun 2017 sebanyak 1 Perkara dan Perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi periode tahun 2017 sebanyak 31 sedangkan dan telah diputus sebanyak 30 perkara (93,75 %) sehingga masih ada sisa 2 perkara.

B. Saran

Untuk menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang diidentifikasi berdasarkan keadaan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan untuk peningkatan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pimpinan Mahkamah Agung RI dimohon mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan volume / beban tugas Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
2. Kepada pimpinan Mahkamah Agung RI dimohonkan untuk meningkatkan Anggaran Rutin sehingga setiap pelaksanaan program kerja dapat ditingkatkan
3. Proyek pembangunan gedung kantor dan pengadaan sarana prasarana lainnya termasuk pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) perlu terus menerus ditingkatkan sesuai standar ideal masing-

masing Pengadilan Agama demi kelancaran tugas untuk meningkatkan kewibawaan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

4. Kepada seluruh ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi agar lebih meningkatkan target penyelesaian perkara dan memperkecil sisa perkara.
5. Pembinaan dan pelatihan kepada Hakim, Pegawai Kepaniteraan dan pegawai lainnya perlu terus menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil, menjalankan dibidang tugasnya dan berahlak mulia).

